



KAPUAS HULU!
SEMAKIN HEBAT!

LPPD 2025

Kabupaten Kapuas Hulu



PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

Tahun 2026



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Kuasa atas berkat dan kasih-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan. Penyusunan LPPD ini merupakan pelaksanaan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai laporan hasil implementasi asas ekonomi daerah serta pelaksanaan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

LPPD ini disusun dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang. Capaian kinerja tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).

Pada Kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan dokumen LPPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025. Semoga materi LPPD ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan lebih lanjut untuk tahun-tahun berikutnya dan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan panduan dan pembinaan bagi Pemerintah Daerah.

Putussibau, 24 Maret 2026

Bupati Kapuas Hulu,



Fransiskus Diaan, S.H.,M.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	25
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	65
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	79
2.1. Capaian Kinerja Makro	79
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	79
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	79
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	86
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	88
2.3.1. Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja	88
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	92
2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	105
2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah	107
2.3.5. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis	109
2.3.6. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025.	115
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 168	



BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	169
4.1. Urusan Pendidikan	169
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	169
4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah	169
4.1.3. Realisasi Capaian SPM	170
4.1.4. Alokasi Anggaran	170
4.1.5. Dukungan Personil	171
4.1.6. Permasalahan dan Solusi	172
4.2. Urusan Kesehatan	173
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	173
4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah	173
4.2.3. Realisasi Capaian SPM	174
4.2.4. Alokasi Anggaran	175
4.2.5. Dukungan Personil	176
4.2.6. Permasalahan dan Solusi	177
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	180
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	180
4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah	180
4.3.3. Realisasi Capaian SPM	181
4.3.4. Alokasi Anggaran	181
4.3.5. Dukungan Personil	182
4.3.6. Permasalahan dan Solusi	183
4.4. Urusan Perumahan Rakyat	183
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	183
4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah	184
4.4.3. Realisasi Capaian SPM	184
4.4.4. Alokasi Anggaran	185
4.4.5. Dukungan Personil	186
4.4.6. Permasalahan dan Solusi	187



4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.....	187
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	187
4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah.....	188
4.5.3. Realisasi Capaian SPM.....	189
4.5.4. Alokasi Anggaran	190
4.5.5. Dukungan Personil	191
4.5.6. Permasalahan dan Solusi.....	192
4.6. Urusan Sosial	193
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar	193
4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah.....	194
4.6.3. Realisasi Capaian SPM.....	195
4.6.4. Alokasi Anggaran	195
4.6.5. Dukungan Personil	196
4.6.6. Permasalahan dan Solusi.....	197
BAB V PENUTUP	198
LAMPIRAN	1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pemerintahan administrasi Kabupaten Kapuas Hulu yang berkedudukan di Putussibau dibentuk pada tanggal 7 Januari 1953 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan, yang pada tanggal 4 Juli 1959 ditetapkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820). Sejalan dengan semangat otonomi daerah setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka nomenklatur Daerah Tingkat II Kapuas Hulu berubah menjadi Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu daerah otonom di Kalimantan Barat, yaitu daerah yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan



Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan LPPD (RLPPD).

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah, dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 812);
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 9) Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025;
- 10) Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 11) Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 12) Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b. Data Geografis Wilayah

b.1. Batas Administrasi Daerah

Kedudukan geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan bagian paling timur dari Propinsi Kalimantan Barat, secara astronomis terletak pada koordinat 0°5' Lintang Utara sampai 1°4' Lintang Selatan dan di antara 111°40' sampai 114°10' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Kalimantan Timur.



- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang.

Jarak dari Putussibau (ibukota Kabupaten Kapuas Hulu) dengan Pontianak (ibukota Propinsi Kalimantan Barat) adalah ± 657 km melalui jalan darat dan ± 842 km melalui jalur sungai Kapuas serta ± 1 jam 15 menit penerbangan.

b.2. Luas Wilayah

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah 31.318 km^2 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 300.2.2-2138 Tahun 2025 tanggal 25 April 2025 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2025 atau mencakup 21,30% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat $147.018,063 \text{ km}^2$ dan sekaligus merupakan kabupaten terluas, setelah Kabupaten Ketapang dan secara administratif memiliki 23 Kecamatan dengan 4 Kelurahan, dan 278 Desa.

Dari total luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, seluas $\pm 3.900 \text{ km}^2$ merupakan daerah perairan atau tergenang (12.45 % dari luas daerah tergenang di seluruh wilayah Kalimantan Barat) dan selebihnya seluas $\pm 10.642,236 \text{ km}^2$ merupakan daerah daratan atau daerah tidak tergenang. Sementara $16.776,01 \text{ km}^2$ atau $\pm 53,57 \%$ merupakan kawasan lindung, termasuk kawasan konservasi dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Taman Nasional Betung Kerihun | : 8.000 km^2 |
| 2. Taman Nasional Danau Sentarum | : 1.320 km^2 |
| 3. Hutan Lindung | : $6.289,73 \text{ km}^2$ |
| 4. Daerah Resapan Air | : $495,46 \text{ km}^2$ |
| 5. Lahan Gambut | : $670,82 \text{ km}^2$ |



b.3. Topografi dan Iklim

1) Topografi

Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dataran rendah serta daerah danau dan rawa yang berair. Kabupaten Kapuas Hulu terdapat beberapa aliran sungai yang memanjang hingga ke timur Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya adalah Sungai Kapuas. Di Kabupaten Kapuas Hulu sungai masih memiliki peranan dalam memenuhi kebutuhan akomodasi transportasi penumpang dan barang dari Putussibau ke kota-kota lain yang berada di jalur sungai kapuas dan ke Kecamatan. Pertanian yang agak menetap dilakukan secara intensif di dataran-dataran sungai yang sempit, sedangkan peladang yang biasa berpindah-pindah telah mempengaruhi banyak dataran pinggiran Daerah Aliran Sungai ini.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah yang sering terjadi banjir musiman, dengan ketinggian banjir dapat mencapai 2 meter bahkan lebih. Morfologi Kapuas Hulu umumnya berbentuk kuali yang terdiri dari dataran rendah atau cekungan yang terendam air serta daerah danau rawa-rawa yang berair cukup dalam. Pada dataran rendah ini terdapat Ibukota Kecamatan yang penduduknya relative ramai, dataran rendah ini berada pada ketinggian 31-46 mdpl. Sedangkan pada dataran tinggi/miring umumnya terdapat rawa-rawa yang memanjang tetapi sempit dan dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Dataran ini termasuk kategori yang biasa digenangi air pada waktu-waktu tertentu,



terutama pada saat curah hujan yang cukup tinggi. Dataran tinggi/miring ini terletak pada ketinggian 4.761 mdpl.

Sebagian besar wilayah Kapuas Hulu memiliki ketinggian antara 25 sampai 500 meter, sehingga tanaman yang banyak tumbuh di wilayah ini adalah tanaman-tanaman dataran rendah sub tropis dan tropis. Sebagian besar daerah dengan ketinggian di atas 500 meter terdapat di Pegunungan Kapuas Hulu di sebelah Utara dan bagian paling Timur Kabupaten Kapuas Hulu yang melingkar sampai ke Pegunungan Muller dekat perbatasan dengan Kalimantan Tengah. Daerah-daerah lembah dan lereng Pegunungan Kapuas Hulu dan Pegunungan Muller umumnya memiliki ketinggian antara 100-500 meter. Sebagian kecil daerah perbukitan di sebelah Utara dan Timur gugusan Danau Luar di Kecamatan Batang Lupar juga memiliki ketinggian antara 100-500 meter.

Topografi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu bervariasi dari dataran alluvial, perbukitan sampai pegunungan. Permukaan lahan datar seluas 798.240 Ha dengan kemiringan 0-2% umumnya berada di wilayah dataran rawa daerah aliran Sungai Kapuas, sedangkan lahan yang tersebar di daerah-daerah kaki perbukitan di Kecamatan Selimbau, Badau, Kecamatan Batang Lupar, Jongkong, Hulu Gurung, Pengkadan dan Empanang bagian Utara. mempunyai kemiringan 2-15%. Sementara daerah kaki Pegunungan Muller dan Pegunungan Kapuas Hulu serta di lembah Sungai Embaloh, Manday, Sibau dan lain-lain yang merupakan daerah sisanya mempunyai kemiringan 15-40%



2) Iklim

a. Curah Hujan

Salah satu unsur iklim yang sangat penting dibandingkan unsur iklim lainnya adalah curah hujan, karena menurut keadaan yang sebenarnya hujan di suatu tempat dengan tempat lainnya dalam kurun waktu tertentu tidak mempunyai nilai yang sama. Di Kabupaten Kapuas Hulu curah hujan cukup tinggi dalam satu tahun berkisar antara 3300 mm sampai 5000 mm dengan jumlah hari hujan antara 240 - 260 per tahun dan jumlah curah hujan maksimum dapat terjadi berkisar antara 29 – 124 mm/hari.

b. Musim

Terdapat 2 (dua) musim di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan juni sampai dengan bulan September. Sedangkan musim penghujan biasa terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret. Keadaan ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November.

c. Suhu dan Kelembaban

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki iklim isothermal hujan tropik dengan musim kemarau yang panas. Maksimum curah hujan ganda dan dengan suhu rata-rata dalam bulan terpanas lebih tinggi dari 22°C. Di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu suhu minimum rata-rata per tahun adalah 21,5°C hingga 23,2°C dan suhu maksimum rata-rata per tahun adalah 32,3°C sampai 34,7°C. Tingginya suhu udara di Kapuas Hulu disebabkan antara lain karena letak Kabupaten Kapuas



Hulu yang relatif dekat dengan garis khatulistiwa dan struktur geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang secara umum berada pada wilayah dataran cukup tinggi.

d. Hidrologi

Pola Drainase Kabupaten Kapuas Hulu didominasi oleh Sungai Kapuas yang mengalir dari wilayah pegunungan Kapuas Hulu sampai di bagian timur Kalimantan Barat, dan memiliki puluhan anak sungai yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah Sungai Embaloh dengan panjang $\pm$ 168 Km yang berhulu di pegunungan Kapuas Hulu di Bagian Utara, Sungai Manday sepanjang sekitar 140 Km, yang mengalir dari pegunungan Muller. Pola perairan di Kabupaten Kapuas Hulu juga diwarnai dengan banyaknya Danau Depresi di daerah-daerah pelembaban dan Danau Oxbow di daerah-daerah meander sungai. Danau-danau ini merupakan sumber penghasilan ikan yang cukup potensial di Kecamatan Selimbau, Semitau, Batang Lupar, Embaloh Hilir, Bunut Hilir, Jongkong dan Badau.

c. Informasi Umum Data Kependudukan

c.1. Jumlah penduduk

Penduduk merupakan salah satu faktor utama sebagai modal dasar pembangunan yang berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja. Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 280.198 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 144.135 jiwa (51,44%) dan penduduk perempuan sebanyak 136.063 jiwa (48,56%).

Dengan luas wilayah yang mencapai 31.318 km², Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kepadatan penduduk 8,95

jiwa/km², hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu relatif kecil dan mayoritas bertempat tinggal di pedesaan. Secara umum, penyebaran penduduk Kabupaten Kapuas Hulu tidak merata dan membentuk pola linear sesuai jalur Sungai Kapuas dan jalur jalan. Pengelompokan penduduk terutama terdapat pada kecamatan-kecamatan yang memiliki akses tinggi ke jalur pelayaran Sungai Kapuas dan jalur jalan darat.

c.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Struktur kependudukan berdasarkan jenis kelamin selain untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan juga digunakan untuk mengetahui rasio jenis kelamin suatu wilayah yang digunakan untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender. Pada tahun 2025 komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel. 1.1.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO. URUT	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PUTUSSIBAU UTARA	14,708	14,136	28,844
2	BIKA	2,694	2,492	5,186
3	EMBALOH HILIR	3,134	2,974	6,108
4	EMBALOH HULU	2,815	2,670	5,485
5	BUNUT HILIR	4,648	4,475	9,123
6	BUNUT HULU	8,563	7,983	16,546
7	JONGKONG	6,042	5,883	11,925
8	HULU GURUNG	7,516	7,208	14,724
9	SELIMBAU	7,522	7,145	14,667
10	SEMITAU	5,614	5,159	10,773
11	SEBERUANG	6,312	5,799	12,111
12	BATANG LUPAR	2,918	2,856	5,774
13	EMPANANG	2,234	2,067	4,301
14	BADAU	4,035	3,860	7,895



NO. URUT	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
15	SILAT HILIR	11,746	10,867	22,613
16	SILAT HULU	6,460	5,961	12,421
17	PUTUSSIBAU SELATAN	14,022	13,326	27,348
18	KALIS	7,712	7,205	14,917
19	BOYAN TANJUNG	7,421	6,957	14,378
20	MENTEBAH	6,253	5,797	12,050
21	PENGKADAN	5,200	4,945	10,145
22	SUHAID	5,269	5,086	10,355
23	PURING KENCANA	1,297	1,212	2,509
	JUMLAH	144,135	136,063	280,198

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Laporan Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2025.

Dari Tabel 1.1. diatas dapat dilihat bahwa rasio jenis kelamin Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 94.40%. Angka tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2025 jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,01%.

c.3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

Struktur penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan usia penduduk merupakan hal penting dikarenakan dengan mengetahui struktur usia penduduk maka dapat diketahui rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk yang menjadi indikator keadaan ekonomi suatu daerah, semakin tinggi angka rasio ketegantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Jika dilihat dari komposisi usia, pada tahun 2025 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 198.343 jiwa atau 70.79 persen, sedangkan penduduk usia non produktif (usia <15 tahun ditambah dengan usia >65 tahun) sebanyak 81.855 jiwa atau 41.27 persen, sehingga angka rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025 adalah sebesar 41.27 hal ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 42 orang penduduk usia non produktif. Lebih lanjut jumlah penduduk berdasarkan komposisi usia disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

NO.	KELOMPOK UMUR	JUMLAH	PERSENTASE
1.	0 - 4 Tahun	17.343	6.19 %
2.	5 - 9 Tahun	23.068	8.23 %
3.	10 - 14 Tahun	24.868	8.88 %
4.	15 - 19 Tahun	24.380	8.70 %
5.	20 - 24 Tahun	24.449	9.08 %
6.	25 - 29 Tahun	23.266	8.30 %
7.	30 – 34 Tahun	20.755	7.41 %
8.	35 – 39 Tahun	21.376	7.63 %
9.	40 – 44 Tahun	22.260	7.94 %
10.	45 – 49 Tahun	20.346	7.26 %
11.	50 – 54 Tahun	16.757	5.98 %
12.	55 – 59 Tahun	13.714	4.89 %
13.	60 – 64 Tahun	10.040	3.58 %
14.	65 – 69 Tahun	7.499	2.68 %
15.	70 – 74 Tahun	4.135	1.48 %
16.	> 75 Tahun	4.942	1.76 %
	Jumlah	280.198	100,00%

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Laporan Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2025.

c.4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Struktur penduduk menurut tingkat pendidikan diperlukan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia dan jenis



pendidikan yang mendominasi suatu wilayah. Apabila dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Kapuas Hulu dari tingkat pendidikan masyarakat, maka rata-rata tingkat pendidikan penduduk adalah tamat Sekolah Dasar/ sederajat yaitu sebesar 25,60 % atau sejumlah 71.719 jiwa, lebih lanjut disampaikan jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Tidak/Belum Sekolah	56.557	20.18%
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	41.480	14.80%
3.	Tamat SD/Sederajat	71.719	25.60%
4.	SLTP/Sederajat	43.012	15.35%
5.	SLTA/Sederajat	50.517	18.03%
6.	Diploma I/II	1.334	0.48%
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	4.185	1.49%
8.	Diploma IV/Strata 1	11.046	3.94%
9.	Strata 2	341	0.12%
10.	Strata 3	7	0,00%
Jumlah		280.198	100,00

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Laporan Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2025.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa

Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 Kecamatan, 278 desa dan 4 kelurahan seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.4.
Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan

No. Urut	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Putussibau Utara	17	2
2.	Putussibau Selatan	14	2



No. Urut	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
3.	Silat Hilir	13	-
4.	Silat Hulu	14	-
5.	Hulu Gurung	15	-
6.	Bunut Hulu	15	-
7.	Mentebah	8	-
8.	Bika	8	-
9.	Kalis	17	-
10.	Embaloh Hilir	9	-
11.	Bunut Hilir	11	-
12.	Boyan Tanjung	16	-
13.	Pengkadan	11	-
14.	Jongkong	14	-
15.	Selimbau	17	-
16.	Suhaid	11	-
17.	Seberuang	15	-
18.	Semitau	12	-
19.	Empanang	6	-
20.	Puring Kencana	6	-
21.	Badau	9	-
22.	Batang Lupar	10	-
23.	Embaloh Hulu	10	-
	Jumlah	278	4

Sumber : Kapuas Hulu Dalam Angka 2023 (BPS Kapuas Hulu)

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujudnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang profesional untuk masyarakat yang sejahtera, maju, cerdas, sehat, produktif melalui akselerasi pembangunan partisipatif berbasiskan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Fransiskus Diaan, S.H., M.H. dan Sukardi S.M. merupakan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih sebagai hasil Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 yang dilantik oleh Presiden Prabowo pada tanggal 26 Februari 2025, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kapuas Hulu Tahun 2025, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di daerah, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah. Berikut disampaikan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu menurut urusan yang dilaksanakan dan dasar hukum.



Tabel 1.5
Nomenklatur Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu

No.	Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Urusan yang dilaksanakan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021	- Pendidikan - Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021	- Kesehatan - Pengendalian Penduduk dan KB
3	Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang	Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021	- Lingkungan Hidup - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Pertanahan
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021	- Sosial - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021	- Perindustrian - Tenaga Kerja - Transmigrasi



No.	Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Urusan yang dilaksanakan
10	Dinas Pertanian dan Pangan	Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021	- Pertanian - Pangan
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021	Perhubungan
14	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021	- Komunikasi dan Informasi - Statistik - Persandian
15	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021	- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Perdagangan
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021	Penanaman Modal
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021	- Kepemudaan dan Olahraga - Pariwisata
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021	- Perpustakaan - Kearsipan
19	Dinas Perikanan	Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021	Kelautan dan Perikanan
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021	Perencanaan, penelitian dan pengembangan
21	Badan Keuangan dan Asset Daerah	Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021	Perencanaan Keuangan dan Manajemen Keuangan
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



No.	Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Urusan yang dilaksanakan
23	Inspektorat	Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021	Pengawasan dan Perencanaan Keuangan
24	Sekretariat Daerah	Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021	- Administrasi Pemerintahan
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021	Administrasi Pemerintahan
26	Badan Pengelola Perbatasan	Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2021 .	Administrasi Pemerintahan
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2021	Administrasi Pemerintahan Umum
28	Badan Pendapatan Daerah	Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021	Perencanaan Keuangan dan Manajemen Keuangan
29	Kecamatan	Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016	Administrasi Pemerintahan
30	Kelurahan	Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016	Administrasi Pemerintahan

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga telah membentuk Unit Perangkat Daerah (Unit Pelaksana Teknis/UPT) berjumlah 542 unit kerja, adapun Nomenklatur UPT sebagaimana tabel berikut.



Tabel 1.6
Nomenklatur Unit Perangkat Daerah
(Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD) di Lingkungan
Pemerintah Kapuas Hulu

No.	Unit Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Keterangan
1	UPT. Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal	Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017	1 unit kerja
2	UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022	1 unit kerja
3	UPT. Pembenihan, Pembibitan Kesehatan Hewan	Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017	1 unit kerja
4	UPT. Benih Ikan	Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2017	1 unit kerja
5	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro	Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022	1 unit kerja
6	UPT. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022	23 unit kerja (di 23 Kecamatan)
7	UPT. Satuan Pendidikan	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019	- Pendidikan Usia Dini sebanyak 22 unit kerja - Pendidikan Dasar sebanyak 490 unit kerja
8	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Semitau	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022	1 unit kerja

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan



Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu, Perangkat Daerah didukung oleh sumber daya aparatur yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan yang melekat pada urusan Pemerintahan Wajib, Pilihan dan Penunjang.

Berikut disampaikan gambaran umum keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan data per 31 Desember 2025, yang merupakan deskripsi ASN dari kategori struktural, fungsional dan pelaksana PNS dan pelaksana PPPK dengan jumlah total seluruh ASN 8.306 orang terdiri dari 3.688 laki-laki dan perempuan 4.618.

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN				Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana (PNS)	Pelaksana (PPPK)	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	7	1716	175	2048	3946
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	24	700	150	1045	1919
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum	12	17	46	108	183
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup	8	12	23	66	109
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6	24	10	50	90



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN				Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana (PNS)	Pelaksana (PPPK)	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5	4	13	41	63
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	5	8	17	33
8	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	6	6	12	20	44
9	Dinas Pertanian dan Pangan	Pangan, Pertanian	7	74	34	100	215
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	5	11	40	63
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	5	18	24	54
12	Dinas Perhubungan	Perhubungan	7	1	22	26	56
13	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, Transparansi Publik	4	6	5	18	33
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	7	8	9	34	58
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	3	6	9	14	32



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN				Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana (PNS)	Pelaksana (PPPK)	
16	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata	5	3	8	19	35
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan dan Kearsipan	4	6	10	14	34
18	Dinas Perikanan	Kelautan dan Perikanan	5	6	22	42	75
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan dan Manajemen Keuangan	6	6	24	31	67
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	8	8	22	22	60
21	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	7	6	19	18	50
22	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	Administrasi Pemerintahan umum	4	1	10	11	26
23	Badan Pendapatan Daerah	Keuangan dan Manajemen Keuangan	5		15	22	42
24	Badan Pengelola Perbatasan	Administrasi Pemerintahan Umum	3	2	6	11	22
25	Inspektorat	Pengawasan	8	30	10	13	61
26	Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan Umum	17	18	63	137	235
27	Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan Umum	5	4	28	97	134
28	Kecamatan	Kewilayahan	146	4	198	150	498
29	Kelurahan		16	1	31	21	69



f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

f.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian Keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengacu pada azas umum pengelolaan Keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat.

f. 2. Pengelolaan Belanja Daerah

Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang Keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan Keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada *'value for money'*. Disamping itu pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik.

f.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri



dari penerimaan pembiayaan. pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA).

Pada tabel 1.7. disampaikan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut.

Tabel 1.7
Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.798.001.845.048	1.742.457.346.534,73	96.91
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	110.966.431.091	133.202.812.209,95	120.03
4.1.01.	Pajak Daerah	46.306.128.060	54.094.384.309,53	116.81
4.1.02.	Retribusi Daerah	3.944.788.998	4.730.704.651	118.42
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.524.575.448	17.524.575.448.85	100
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	43.140.938.585	56.853.147.800,57	131.78
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.673.287.751.783	1.595.332.932.471	95.34
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.610.674.190.796	1.539.383.934.779	95.57
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.613.560.987	55.948.997.692	89.35
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.747.662.174	13.921.601.853,78	101.26
4.3.01.	Pendapatan Hibah	86.953.783	501.374.337,78	576.59
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.660.708.391	13.420.227.516	98.23
5.	BELANJA DAERAH	1.803.614.485.759	1.646.412.663.713,27	91.28
5.1.	BELANJA OPERASI	1.237.122.609.438	1.138.336.087.761	92.01
5.1.01.	Belanja Pegawai	772.929.895.447	698.419.746.937,64	90.36
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	358.359.339.771	338.154.961.659,44	94.36
5.1.05.	Belanja Hibah	104.677.374.220	100.613.676.445,27	96.11
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	407.200.000	398.902.720	97.96



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
5.2.	BELANJA MODAL	205.167.710.321	202.794.227.908,73	98.84
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.094.941.049	34.723.736.544	98.84
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.988.241.000	86.455.438.903,73	99.38
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.564.023.471	61.136.012.061	97.71
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.415.104.801	20.374.452.400	99.80
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.500.000.000	3.692.526.851.55	67.13
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000	3.692.526.851.55	67.13
5.4.	BELANJA TRANSFER	355.824.166.000	301.589.821.191	84.75
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	5.258.858.000	4.973.717.564	94.57
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	350.565.308.000	296.616.103.627	84.61
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.612.640.711)	96.044.682.821,46	(1.711,22)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	5.612.640.711	5.612.640.711,47	100
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.612.640.711	15.612.640.711,47	100
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.612.640.711	15.612.640.711,47	
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	10.000.000.000	100
6.Z.	PEMBIAYAAN NETTO	5.612.640.711	5.612.640.711,47	
6.Z.Z.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00-	101.657.323.532,93	

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, keadaan per 31 Desember 2025 (unaudited) di keluarkan tanggal 6 Maret 2026

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan menjadi pedoman untuk mempermudah pencapaian tujuan di masa yang akan datang dengan membuat strategi serta tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah Daerah menggunakan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan daerah. Dalam kedua Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah harus membuat dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan perencanaan jangka pendek yaitu Rencana Kerja (Renja). Adapun Renstra dan



Renja mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan daerah memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Setelah menelaah kajian data dan informasi serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yakni: “Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu”.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan sebagai berikut:



Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada bagan berikut.:

1. Belum optimalnya perwujudan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Meningkatnya potensi pergeseran nilai-nilai norma dan kebudayaan masyarakat sebagai dampak media social
3. Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan kesejahteraan masyarakat
4. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas berbasis potensi unggulan yang ramah lingkungan
5. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur daerah yang merata
6. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

b. Visi dan misi kepala daerah

1) Visi

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025- 2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode



sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

**“Terwujudnya Kapuas Hulu
SEMAKIN HEBAT” (Semakin
Harmonis, Semakin
Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin
Terampil)”**

2) Misi

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya- upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memerhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) **MISI 1: Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kehidupan beragama, berbudaya, sosial dan keamanan**, mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan harmonis antar umat beragama dengan tetap melestarikan kebudayaan lokal.
- 2) **MISI 2: Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan**, Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis



potensi daerah berbasis hilirisasi dan peningkatan investasi daerah dengan memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan

- 3) **MISI 3: Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas pendidikan,** Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar khususnya di bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- 4) **MISI 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas,** misi ini dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan birokrasi pemerintahan yang berintegritas, bersih, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara adil.
- 5) **MISI 5: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu yang berkualitas dan terampil melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya,** Meningkatkan kapasitas keterampilan Sumber Daya Manusia yang berkualitas disertai dengan penyediaan sarana prasarana kepelatihan.

- c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 yaitu :



Tabel 1.12
Urusan Pemerintah Daerah dan Program

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DISPENBUD
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DISPENBUD
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DISPENBUD
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	DISPENBUD
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINKESPPKB
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKESPPKB
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINKESPPKB
8	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINKESPPKB
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINKESPPKB
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPUPR
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DPUPR
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DPUPR
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DPUPR
14	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	DPUPR
15	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUPR
16	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DPUPR
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPR
18	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DPUPR
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPUPR
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DPRKPPLH
22	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
23	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DPRKPPLH



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
24	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DPRKPPLH
25	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKPPLH
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
26	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOLPP
27	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD KH
28	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	BPBD KH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
29	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINSOS PPKB
30	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	DINSOS PPKB
31	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOS PPKB
32	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINSOS PPKB
33	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINSOS PPKB
34	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINSOS PPKB
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
35	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DISNAKERINTRANS
36	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DISNAKERINTRANS
37	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DISNAKERINTRANS
38	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DISNAKERINTRANS
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
40	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINSOS PPKB
41	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINSOS PPKB
42	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINSOS PPKB
43	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINSOS PPKB
44	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINSOS PPKB
45	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINSOS PPKB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
46	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DISTAN
47	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DISTAN
48	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DISTAN
49	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DISTAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	
51	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	DPRKPPLH
52	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	DPRKPPLH
53	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	DPRKPPLH
54	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	DPRKPPLH
55	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	DPRKPPLH
57	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DPRKPPLH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
63	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DPRKPPLH
64	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DPRKPPLH
65	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DPRKPPLH
66	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DPRKPPLH
67	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DPRKPPLH
68	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	DPRKPPLH
69	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DPRKPPLH
70	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DPRKPPLH
71	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DPRKPPLH
72	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DPRKPPLH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
73	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DISDUKCAPIL
74	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
75	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DISDUKCAPIL
76	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DISDUKCAPIL
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
77	PROGRAM PENATAAN DESA	DPMD
78	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	DPMD
79	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD
80	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DPMD
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
81	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINSOSPPKB
82	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINSOSPPKB
83	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINSOSPPKB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
84	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUB
85	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DISHUB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
86	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DISKOMINFOTIK
87	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DISKOMINFOTIK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
88	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	DINKOPUKMP
89	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINKOPUKMP
90	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DINKOPUKMP
91	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINKOPUKMP
92	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINKOPUKMP



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
93	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINKOPUKMP
94	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINKOPUKMP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
95	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
96	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
97	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
98	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
99	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISPORAPAR
100	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DISPORAPAR
101	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	DISPORAPAR
102	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	
103	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DISKOMINFOTIK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	
104	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DISKOMINFOTIK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
105	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DISPENBUD
106	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DISPENBUD
108	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DISPENBUD
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINPERSIP
110	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINPERSIP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
112	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINPERSIP
113	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINPERSIP



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
114	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	DINPERSIP
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
115	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DISKAN
116	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DISKAN
117	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DISKAN
118	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DISKAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
119	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DISPORAPAR
120	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DISPORAPAR
121	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
122	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DISPORAPAR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
123	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DISPANGAN
124	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DISPANGAN
125	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DISPANGAN
126	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DISPANGAN
127	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DISPANGAN
128	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DISPANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
129	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DINKOPUKMP
130	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINKOPUKMP
131	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINKOPUKMP
132	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DINKOPUKMP
133	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINKOPUKMP
134	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINKOPUKMP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
135	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DISNAKERINTRANS
136	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DISNAKERINTRANS
137	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DISNAKERINTRANS
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	
138	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DISNAKERINTRANS
139	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DISNAKERINTRANS
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SETDA
140	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	SETDA
141	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA
142	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SETDA
143	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	SET DPRD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SET DPRD
144	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SET DPRD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAPPEDA
145	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA
146	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA
	KEUANGAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
147	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKD
148	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BKD
149	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA
	KEPEGAWAIAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPSDM
150	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
151	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM KABUPATEN KAPUAS HULU
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
152	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BAPPEDA



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
	PENGELOLAAN PERBATASAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPP
153	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	BPP
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
	INSPEKTORAT DAERAH	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INSPEKTORAT
154	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
155	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
	UNSUR KEWILAYAHAN	
	KECAMATAN	
156	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SETDA
157	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	SETDA
158	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP
159	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	SETDA
160	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	DPMD
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BAKESBANGPOL
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAKESBANGPOL
161	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BAKESBANGPOL
162	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BAKESBANGPOL
163	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BAKESBANGPOL
164	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	BAKESBANGPOL
165	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BAKESBANGPOL

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 yaitu :



Tabel 1.13

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	Penyediaan Bahan/Material	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
	Pembangunan Puskesmas	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	Pengadaan Obat, Vaksin	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	
	Pengendalian Program KKBPK	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
2	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan, Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Jasa, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Perasana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	
	Pelayanan antar Kerja	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha,	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Sektor industri	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Keg. Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Evaluasi Kinerja Perangkat	
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Pendataan dan Pengolahan Adminidtrasi Kepegawaian	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Mebel	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
	Keg. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
	Keg. Penataan Pendaftaran Penduduk	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
	Keg. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
	Keg. Pelayanan Pencatatan Sipil	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Peaporan Peristiwa Penting	
	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
	Keg. Penyelenggaran Pencatatan Sipil	
	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
	Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
	Keg. Penyusunan Profil Kependudukan	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
	Keg. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
5	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
	Kegiatan : Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Prangkat Daerah	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
	Koordinasidan Penilaian Barang milik Daerah	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Kegiatan : Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan/ Rehab Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	
	Program : Penataan Desa	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
	Program : Peningkatan Kerjasama Desa	
	Kegiatan : fasilitasi kerjasama antar desa	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
	Program : Administrasi Pemerintahan Desa	
	Kegiatan : Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	
	penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kades	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	
	Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Begerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
	Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
7	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
	Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
	Sub Kegiatan : Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	
	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
	Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Kegiatan : Administrasi Umum	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTA	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	Penyusunan Standar Harga	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	
	Penilaian Barang Milik Daerah	
	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN MENTEBAH
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	PENATAAN ORGANISASI	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN HULU GURUNG
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN BADAU
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Hukum Penerapan SPM

Penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akutanbel, bisa



dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan. Pemerintah telah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai upaya mengurangi variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas urusan Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat, Sosial Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Secara umum, kebijakan penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintahan daerah dengan mutu tertentu, mendorong transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam penyediaan pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.



Kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat melalui bagaimana kualitas pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan pelayanan dasar dilihat dari kepuasan masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan yang telah diberikan Pemerintah. Adapun pedoman penyelenggaraan SPM yang terkait dengan mutu pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/ 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 tentang Standar Pelayanan Minimal SubUrusan Bencana Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;



- 9) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;

Berkaitan dengan penerapan SPM dalam penyelenggaraan pelayanan dasar di Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Kebijakan Umum SPM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Sebagai upaya penerapan SPM di Kabupaten Kapuas Hulu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang dicapai melalui kebijakan perbaikan kualitas layanan publik, dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengampu SPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kegiatan SPM bukan merupakan kegiatan yang terpisah dari tugas dan fungsi unit kerja tetapi merupakan bagian dari program dan kegiatan yang



dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan pembiayaan melalui APBD. Dengan demikian, tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan program pemerintah, pemerintah daerah dan pihak swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dengan indikator kinerja makro yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan. Adapun capaian Kinerja Makro tahun 2025 dan peningkatan atau pertumbuhannya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Laju Kinerja (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,77	69,24	0,68
2	Angka Kemiskinan	7,4	6,86	-7,30
3	Angka Pengangguran	2,18	2,09	-4,13
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,75	4,77	0,42
5	Pendapatan Per Kapita	53.963 (dalam Juta)	57.839	7,18
6	Ketimpangan Pendapatan	0,306	0,268	-12,42

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

Hasil (*Outcome*) adalah hasil yang dicapai dalam jangka menengah, menggambarkan hasil aktual atau yang diharapkan dari barang/jasa/kegiatan/layanan yang telah dihasilkan, berupa peningkatan kuantitas/kualitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas dan atau



peningkatan pendapatan. Indikator hasil dijadikan landasan untuk menilai apakah hasil yang diperoleh dalam bentuk ouput dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan bagi masyarakat. Berikut disampaikan capaian indikator kinerja kunci hasil (*outcome*) pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 2.2.
Capaian Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Pendidikan	1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	69,26%	
		2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93,19%	
		3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	6,70%	
		4	Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	56,46%	
		5	Persentase Ruang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah pertama dalam kondisi Baik	62,42%	
2	Kesehatan	1	Persentase Kematian Ibu	0,09%	
		2	Prevalensi Stunting	27,97%	
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	79,48%	
		4	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	100 %	
		5	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	95,40%	
		6	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	86,66%	
		7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100.00%	
		8	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	97,02%	
		9	Persentase Warga Negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	96,63%	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %	
		11	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita penderita DM sesuai standar	100.00%	
		12	persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100.00%	
		13	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	100.00%	
		14	Persentase pelayanan kesehatan orang degan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) sesuai standar	100.00%	
3	Pekerjaan Umum	1	Persentase Kondisi Irigasi Kewenagnan Kabupaten	8,55 %	
		2	Persentase Kemantapan jalan Kabupaten	34,77 %	
		3	Persenase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadapat Jumlah Penduduk Kabupaten	59,53 %	
		4	Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	79,08 %	
		5	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengenalian dan Mitigasi Banjir	0 %	
		6	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang pantai Kewenagan Kabupaten	0	
		7	Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten	100 %	
		8	Persentase Persetujuan Bangunan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	0	
		9	Rasio tenaga Operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat Kompetensi	3.98 %	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		10	Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang sudah diterbitkan kabupaten	100 %		
4	Perumahan Rakyat	1	Persentase Warga negara Korban Bencana Kabupaten Yang Memperole Rumah LayakHuni	0		
		2	Persentase Kawasan Pemukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten yang ditangani	0		
		3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	3.86%		
		4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	0.00%		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Dokumen Kebencanaan Yang telah ditetapkan dan Masih berlaku	0.00%		
		2	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakt yang dilaksanakan oleh Satuan polisi Pamong Praja	100.00%		
		3	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	100.00%		
		4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0.34%		
		5	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100.00%		
		6	persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	47.37%		
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	14,40%		
		2	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	91.67%		
		3	Persentase Anak Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	0.72%		
		4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	0		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		5	Persentase korban bencana alam, Sosial dan/atau Non Alam Yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten	0.18%		
		6	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	6.39%		
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100.00%		
		2	Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	62.00%		
		3	Persentase Pekerja bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan sosial Ketenagakerjaan	100.00%		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	50.00%		
		2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang mendapatkan layanan komprehensif	30.00%		
9	Pangan	1	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten	0		
10	Pertanahan	1	Persentase Ditetapkannya Hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	12,15 %		
		2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Wilayah	0.00%		
		3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	0.00%		
11	Lingkungan Hidup	1	Persentase Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	100.00%		
		2	Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani	7.06%		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan yang diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	99,67		
		2	Persentase Kepemilikan Kartu identitas Anak	97.79%		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3	Persentase Data Profil Kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100.00%		
		4	Persentase Kepemilikan Kartu Tnda Penduduk (KTP) Elektronik	98.13%		
		5	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100 %		
		6	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan Bagi yang melaporkan	100.00%		
		7	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100.00%		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100.00%		
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	39.34%		
		3	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	100.00%		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (angka kelahiran total) per wanita usia subur usia 15-49 tahun	2,27		
		2	Angka prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68,60 %		
		3	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	6.06%		
15	Perhubungan	1	Konektivitas Kabupaten	0,78%		
		2	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,29%		
		3	Persentase Perusahaan Angkutan umum yang Tersertifikasi Sistem manajemen Keselamatan	16.67%		
16	Komunikasi dan Informatika	1	persentase perangkat daerah yg terhubung dgn akses internet yg disediakan oleh Dinas Kominfo	2.00%		
		2	persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	14,29%		
		3	persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	100.00%		
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	Mengukur Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	14.91%		
		2	Persentase Usaha Kecil Yang bertransformasi dari informal ke formal	43.95%		
18	Penanaman Modal	1	persentase peningkatan investasi di Kabupaten	-1.44%		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2	Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	136.65%		
19	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	100.00%		
		2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.90%		
		3	Persentase Atlet yang berasal dari kabupaten yang masuk pemusatan latihan daerah Provinsi	12.50%		
		4	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	100.00%		
20	Statistik	1	Persentase Kepatuhan Daftar Data yang dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah	100%		
21	Persandian	1	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	7.41%		
22	Kebudayaan	1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	100.00%		
		2	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah	0		
23	Perpustakaan	1	nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	60,55		
		2	indeks pembangunan literasi masyarakat	21.77		
24	Kearsipan	1	tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)	95,56		
25	Kelautan dan Perikanan	1	Angka Konsumsi Ikan	42,74		
		2	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	100.00%		
26	Pariwisata	1	Persentase Investasi Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	-16,502.92%		
		2	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	13.72%		
		3	Persentase peningkatan Perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	22.97%		
27	Pertanian	1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	-5,05%		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2	Pesentase peningkatan produksi hortikultura	-16,50		
		3	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	10.61%		
		4	Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular strategis (diperoleh dari surveylance Penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	65,91 %		
28	Perdagangan	1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	65.34%		
29	Perindustrian	1	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	0		
		2	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	2.02%		
		3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	5.31%	3072	
		4	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	4.23%		

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang

NO	URUSAN FUNGSI PENUNJANG	IKK		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Perencanaan	1	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100 %		
2	Keuangan	1	Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan	32,80%		
		2	Persentase Pendapatan Asli daerah Terhadap Pendapatan Daerah	7,64%		



NO	URUSAN FUNGSI PENUNJANG	IKK		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah	92,90%		
		4	Persentase Aloksi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	5,41 %		
3	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1	Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan Perguruan Tinggi (ASN Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	69,673%		
4	Penelitian dan Pengembangan	1	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	100.00%		
5	Pengawasan	1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3		
		2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3		
		3	Manajemen Resiko Indeks	0		
		4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1	84.95%		
6	Pengadaan	1	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ)	35,56%		
		2	Pemanfaatan sistem Pengadaan	23,68%		
		3	Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barag dan Jasa (SDM PBJ)	18,95%		
7	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	8	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD Tahun 2025	tepat		
		9	Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025	80 %		
8	Pelayanan Publik	1	Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	91,90		



2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban Kepala Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Pada pembahasan ini disajikan uraian hasil pengukuran, Analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta Langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan tersebut.

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan dibandingkan dengan realisasi kinerja. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target realisasi indicator dan dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD.

2.3.1. Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari Bupati Kapuas Hulu kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan komitmen dan kesepakatan antara Bupati Kapuas Hulu dengan para Kepala Perangkat Daerah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yg disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi juga termasuk kinerja outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja tersebut memuat indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tiap-tiap sasaran yang telah ditetapkan.



Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. IKU tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Selain itu, pada tahun 2025 juga terdapat penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 memuat 2(dua) perjanjian kinerja dengan berpedoman RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029 yang ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.1.

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 RPJMD 2021-2026

Sasaran		Indikator Sasaran	Target 2025
1.	Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100
2.	Meningkatnya Toleransi, Kesenjangan dan Kerja Sama Antar Umat Beragama	2. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	86
3.	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Resiko Bencana	3. Indeks Resiko Bencana	118,9
4.	Meningkatnya Nilai-Nilai Luhur Budaya Daerah	4. Indeks Pembangunan Kebudayaan	78
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,4 %
		6. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,4 %
		7. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,78 %
		8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,53 %
6,	Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Kategori Mandiri	9. Jumlah Desa Mandiri	61 desa
7.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	10. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	38,45 %
8.	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja	11. Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	19,99 %



Sasaran		Indikator Sasaran	Target 2025
9.	Meningkatnya Investasi Daerah	12. Nilai Realisasi Investasi	615,63 milyar
10.	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri, Produktif dan Berdaya Saing	13. Persentase Usaha Mikro	93,52 %
		14. Persentase Koperasi Aktif	48,25 %
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	15. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,96
12.	Meningkatnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	16. Persentase RDTR	52,17 %
13.	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	17. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,92 tahun
14.	Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	18. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,39 tahun
15.	Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat	19. Angka Harapan Hidup	73,35 tahun
16.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	20. Pengeluaran Perkapita (000 Rp/Kapita/Thn)	7.842
17.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	21. Nilai SAKIP	BB
18.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	22. Indeks Kepuasan Masyarakat	80,9
19.	Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	23. Opini BPK	WTP
20.	Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	24. Predikat SPBE	Baik
21.	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	25. Predikat KIP	Informatif
22.	Meningkatnya Maturitas SPIP	26. Level Maturitas SPIP	3
23.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang Berkualitas dan Profesional	27. Indeks Profesionalitas ASN	49,5
24.	Meningkatnya Kualitas Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten	28. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	76 %
25.	Meningkatnya Kualitas Jalan pada Status Ruas Jalan Desa	29. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	67 %
26.	Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	30. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	84,2 %
27.	Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak	31. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	79,83 %
28.	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi	32. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	83,66 %



Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
29. Meningkatnya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	33. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	100 %
30. Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	34. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani	62,75 %
31. Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten	35. Resiko Konektivitas Kabupaten	75,8
32. Meningkatnya SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	36. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	83
33. Meningkatnya Mutu Fasyankes Dasar dan Rujukan	37. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	76

Tabel. 3.1.

Target Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

RPJMD 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kondisivitas Wilayah	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani	100
		Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100
2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal	Persentase Kebudayaan Lokal yang di Lestarkan	100
3	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,44
		PDRB Sektor Industri Pengolahan	2,14
		PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,79
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,875
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	7,4
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	2,51
6	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	8
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,38
8	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	128,21
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,66
10	Terjaminnya Ketersediaan Pangan Sebagai Kebutuhan Dasar	Indeks Ketahanan Pangan	74,44
11	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,25
		Rata-Rata Lama Sekolah	8,12
		Indeks Pembangunan Literasi	56,37
12	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	8.770



No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
13	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	63,96
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	B
15	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Efektif, Informatif dan Kolaboratif	Predikat Pemerintahan Digital	Baik
		Predikat KIP	Informatif
		Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2,26
16	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Tertib, Profesional dan Berintegritas	Indeks Sistem Merit	76,93
		Nilai Survei Penilaian Integritas	71,98
		Level Maturitas SPIP Terintegrasi	3,01
		Opini BPK	WTP
		Indeks Kearsipan Daerah	83,63
17	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	3,18
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,9
18	Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Berkualitas di Kapuas Hulu	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,28

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai indikator sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2025-2029, berdasarkan target perjanjian kinerja pada Tahun 2025, maka perlu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara target perjanjian kinerja dengan realisasi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun hasil pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut.



Tabel 3.2

Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 pada Indikator Tujuan
(RPJMD 2021-2026)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
				2024	Target	Capaian	%	Target	%
A	MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan								
1.1	Indeks Rasa Aman	Indeks	76,31		97			96,08	
B	MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan Aktifitas Ekonomi yang Adil dan Pro Rakyat, Serta Ramah Investasi								
2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,43	4,75	4	4,77	119,25	5	95,40
2.2	Persentase Desa Mandiri	%	13,31	36,69	21,94	41,01	186,91	24,1	170,15
2.3	1. Tingkat Kemiskinan	%	8,33	7,40	7,33	6,86	106,41	7,08	103,11
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,02	2,18	3,17	2,09	134,07	3	130,33
2.4	Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Predikat	Baik	Baik	Baik	Sedang	100	Baik	100
C	MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Berbudaya, Mandiri, Cerdas dan Inovatif dalam Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan yang Memiliki Daya Saing								
3.1	Indeks Pembangunan Manusia	-	65,69	68,77	68,66	69,24	100,84	69,17	100,10
D	MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas								
4.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	BB	B			BB	
4.2	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	72,22	71,79	80,92			83,83	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
				2024	Target	Capaian	%	Target	%
E	MISI 5 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Sejahtera dalam Pelayanan Kesehatan Dasar yang Bermutu Bagi Masyarakat								
5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	Score	0	83,5	79,50	82,78	104,13	82,5	100,34
Rata-Rata Capaian Kinerja							85,16		79,94

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 pada Indikator Tujuan
(RPJMD 2025-2029)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
A	MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Berbudaya, Sosial dan Keamanan							
1.1	Indeks Rasa Aman	Indeks	NA	71	100.00	140.85	75	133.33
B	MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan							
2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.75	4.72	4.77	101.06	5.12	93.16



No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
2.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	kriteria	Baik	Baik	Sedang	100.00	Baik	100.00
C	MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas pendidikan							
3.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68.77	69.68	69.24	99.37	73.32	94.44
	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	86.52	86.69	86.83	100.16	87.49	99.25
D	MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas							
4.1	Predikat Reformasi Birokrasi	Predikat	B	BB	BB	100.00	BB	
E	MISI 5 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu yang berkualitas dan terampil melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya							
5.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.18	2.18	2.09	104.13	2.14	102.34
						Rata-Rata Capaian Kinerja	106.51	88.93



Tabel. 3.3
Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 pada Indikator Sasaran
(RPJMD 2021-2026)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)		
					Target	Capaian	%	Target	%	
A	MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan									
1	1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00
	2	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks	76		86	0,00	0,00	88	0,00
	3	Indeks Resiko Bencana	Indeks	129,23	135,17	118,9	137,63	84,25	116,3	81,66
	4	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A		78	0,00	0,00	80	0,00
B	MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan Aktifitas Ekonomi yang Adil dan Pro Rakyat, Serta Ramah Investasi									
1	5	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-0,65	3,92	1,4	2,22	158,57	1,5	148,00
	6	LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-10,01	5,79	3,4	5,10	150,00	4,2	121,43
	7	LPE Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,98	3,63	5,78	1,38	23,88	5,98	23,08
	8	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	-12,9		4,53	0,00	0,00	5,58	0,00
2	9	Jumlah Desa Mandiri	Desa	37	102	61	114,00	186,89	67	170,15



No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
					Target	Capaian	%	Target	%
3	10 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	35,43	52,15	38,45	28,09	73,06	39,12	71,80
	11 Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	%	5,14	2,85	19,99	3,97	19,86	20,82	19,07
	12 Nilai Realisasi Investasi	Milyar	546,57	907,84	615,63	894,79	145,34	620,2	144,27
	13 Persentase Usaha Mikro	%	92,56	99,93	93,52	99,91	106,83	93,72	106,60
	14 Persentase Koperasi Aktif	%	37,35	47,54	48,25	54,61	113,18	51,36	106,33
4	15 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,17	79,79	74,96	82,82	110,49	75,05	110,35
	16 Persentase RDTR	%	4,35	4,35	52,17	11,11	21,30	65,22	17,03
C	MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Berbudaya, Mandiri, Cerdas dan Inovatif dalam Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan yang Memiliki Daya Saing								
1	17 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,05	12,23	12,92	12,24	94,74	13,04	93,87
	18 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,52	8,03	8,39	8,04	95,83	8,54	94,15
	19 Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	73,49	73,35	73,69	100,46	73,51	100,24
	20 Pengeluaran Perkapita	000 Rp/ Kapita/Thn	7.162	8.470	7.842	8.765	111,77	7.963	110,07
D	MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas								
1	21 Nilai SAKIP	Predikat	B	B	BB	B	96,20	A	87,49
	22 Indeks Kepuasan Masyarakat	Score	80,3	83,63	80,9	84,10	103,96	81	103,83
	23 Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100



No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
					Target	Capaian	%	Target	%
	24 Predikat SPBE	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	100,00	Baik	100,00
	25 Predikat KIP	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	100,00	Informatif	100
	26 Level Maturitas SPIP	Level	3	3,01	3	3,01	100,33	3	100,33
	27 Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	48,19	76,64	49,5	67,43	136,22	50	134,86
2	28 Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	%	64	34,25	76	34,77	45,75	79	44,01
	29 Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	%	59	28,62	67	28,89	43,12	69	41,87
	30 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum	%	78,76	58,52	84,2	58,29	69,23	87,03	66,98
	31 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	74,46	78,65	79,83	79,08	99,06	82,64	95,69
	32 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	71,66	77,71	83,66	78,23	93,51	86,66	90,27
	33 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	0,00
	34 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten yang Ditangani	%	37,55	6,06	62,75	0,00	0,00	69,05	0,00
	35 Rasio Konektivitas Kabupaten	Angka	56,2	69,57	75,8	53,8	70,98	80,7	66,67
E	MISI 5 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Sejahtera dalam Pelayanan Kesehatan Dasar yang Bermutu Bagi Masyarakat								
1	36 Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	Score		84,04	83	84,34	101,61	85	99,22
	37 Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	Score		85,18	76	84,92	111,74	80	106,15
Rata-Rata Capaian Kinerja							80,22		77,18



Tabel. 3.3
Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 pada Indikator Sasaran
(RPJMD 2025-2029)

No	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2029)	
					2024	Target	Capaian	%	Target	%
A	MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Berbudaya, Sosial dan Keamanan									
1	1	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	persen	100	100	100	100	100.00	100	100.00
	2	Persentase konflik sosial yang tertangani	persen	100	100	100	100	100.00	100	100.00
	3	Persentase Kebudayaan lokal yang dilestarikan	persen	100	100	100	100	100.00	100	100.00
B	MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan									
1	4	PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	persen	0.44	3.63	2.10	1.38	65.71	3	46.00
	5	PDRB Sektor industri pengolahan	persen	2.14	3.92	2.64	2.22	84.09	3.64	60.99
	6	PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	persen	5.79	5.79	3.20	5.10	159.38	3.6	141.67
	7	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	persen	5.750	5.98	3.11	4.27	137.30	2.24	190.63
2	8	Tingkat Kemiskinan	persen	7.4	7.40	7.40	6.86	107.30	6.5	94.46
3	9	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	nilai	N		2.51		0.00	2.55	0.00



No	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2029)	
					2024	Target	Capaian	%	Target	%
	10	Persentase peningkatan investasi daerah	persen	-35.35	-35.35	8.00	-1.44	-18.00	8	-18.00
	11	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai	79.79	79.79	83.38	82.82	99.33	83.7	98.95
	12	Indeks Resiko Bencana	indeks	135.17	135.17	128.21	137.63	92.65	123.29	88.37
C	MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas pendidikan									
1	13	Angka Harapan Hidup	tahun	73.49	73.49	73.66	73.69	100.04	74.34	99.13
	14	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	74.43		74.44	68.28	91.72	74.48	91.68
	15	Harapan Lama Sekolah	tahun	12.23	12.23	12.25	12.24	99.92	12.33	99.27
	16	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8.03	8.03	8.12	8.04	99.01	8.48	94.81
	17	Indeks Pembangunan Literasi	skor	54.87		56.37	21.77	38.62	62.57	34.79
	18	Pengeluaran Perkapita	000 Rp/ Kapita/ Thn	8,470	8,470	8,770	8,765	99.94	9,970	87.91
	19	Indeks pemberdayaan gender	indeks	63.76		64.16	86.83	135.33	64.76	134.08
D	MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas									
1	20	Predikat SAKIP	predikat	B	B	B	B	100.00	BB	87.49
	21	Predikat Pemerintahan Digital	predikat	Baik		Baik	Baik	100.00	Baik	100.00
	22	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	100.00	Informatif	100
	23	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	indeks	2.26	2.26	2.26		0.00	2.6	100.00
	24	Indeks Sistem Merit	angka	76.43	253.5	76.93		0.00	76.53	0.00



No	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2029)	
					2024	Target	Capaian	%	Target	%
2	25	Nilai Survei Penilaian Integritas	nilai	71.98	76.12	71.98	71.98	100.00	71.98	100.00
	26	Level maturitas SPIP terintegrasi	level	3.01	3.01	3.01	3.01	100.00	3.01	100.00
	27	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00	WTP	100.00
	28	Indeks kearsipan daerah	indeks	83.13		83.63	69.84	83.51	85.63	81.56
	29	Indeks pelayanan publik	indeks	3.08	3.08	3.18	3.99	125.47	3.58	111.45
	30	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	82.74	84.1	82.9	84.10	101.45	84.9	99.06
E	MISI 5 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu yang berkualitas dan terampil melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya									
1	31	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	72.28	76.02	73.28	74.19	101.24	75.28	98.55
Rata-Rata Capaian Kinerja								80.13		80.76



Tabel. 3.3.

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 RPJMD 2021-2026

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100,00	100,00
2. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	86	0,00	0,00
3. Indeks Resiko Bencana	118,9	137,63	84,25
4. Indeks Pembangunan Kebudayaan	78	0,00	0,00
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,4%	2,22%	158,57
6. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,4%	5,10%	150,00
7. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,78%	1,38%	23,88
8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,53%	0,00%	0,00
9. Jumlah Desa Mandiri	61 desa	114 desa	186,89
10. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	38,45%	28,09%	73,06
11. Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	19,99%	3,97%	19,86
12. Nilai Realisasi Investasi	615,63 milyar	894,79 milyar	145,34
13. Persentase Usaha Mikro	93,52%	99,91%	106,83
14. Persentase Koperasi Aktif	48,25%	54,61%	113,18
15. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,96	82,82	110,49
16. Persentase RDTR	52,17%	11,11%	21,30
17. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,92 tahun	12,24 tahun	94,74
18. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,39 tahun	8,04 tahun	95,83
19. Angka Harapan Hidup	73,35 tahun	73,69 tahun	100,46
20. Pengeluaran Perkapita	7.842 Rp/kapita/thn	8.765 Rp/kapita/thn	111,77
21. Nilai SAKIP	BB	B	96,20
22. Indeks Kepuasan Masyarakat	80,9	84,10	103,96
23. Opini BPK	WTP	WTP	100,00
24. Predikat SPBE	Baik	Baik	100,00
25. Predikat KIP	Informatif	Informatif	100,00
26. Level Maturitas SPIP	3	3,01	100,33
27. Indeks Profesionalitas ASN	49,5	67,43	136,22
28. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	76%	34,77%	45,75
29. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	67%	28,89%	43,12



Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
30. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	84,2%	58,29%	69,23
31. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	79,83%	79,08%	99,06
32. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	83,66%	78,23%	93,51
33. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	100%	100,00	100,00
34. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani	62,75%	0,00	0,00
35. Rasio Konektivitas Kabupaten	75,8	53,80	70,98
36. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	83	84,34	101,61
37. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	76	84,92	111,74

Tabel. 3.3.

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 RPJMD 2025-2029

Indikator Sasaran	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
1 Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	100	100.00	100.00%
2 Persentase konflik sosial yang tertangani	100	100.00	100.00%
3 Persentase kebudayaan lokal yang dilestarikan	100	100.00	100.00%
4 PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	2.10	1.38	65.71%
5 PDRB Sektor industri pengolahan	2.64	2.22	84.09%
6 PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3.20	5.10	159.38%
7 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.11	4.27	137.30%
8 Tingkat Kemiskinan	7.40	6.86	107.30%
9 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	2.51	0	0.00%
10 Persentase peningkatan investasi daerah	8.00	-1.44	-18.00%
11 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83.38	82.82	99.33%
12 Indeks Resiko Bencana	128.21	137.63	92.65%



Indikator Sasaran	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
13 Angka Harapan Hidup	73.66	73.69	100.04%
14 Indeks Ketahanan Pangan	74.44	68.28	91.72%
15 Harapan Lama Sekolah	12.25	12.24	99.92%
16 Rata-Rata Lama Sekolah	8.12	8.04	99.01%
17 Indeks Pembangunan Literasi	56.37	21.77	38.62%
18 Pengeluaran Perkapita	8,770	8,765.00	99.94%
19 Indeks pemberdayaan gender	63.96	86.83	135.76%
20 Predikat SAKIP	B	B	100.00%
21 Predikat Pemerintahan Digital	Baik	Baik	100.00%
22 Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	100.00%
23 Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2.26	2.26	100.00%
24 Indeks Sistem Merit	258	253.5	98.26%
25 Nilai Survei Penilaian Integritas	71.98	71.98	100.00%
26 Level maturitas SPIP terintegrasi	3.01	3.01	100.00%
27 Opini BPK	WTP	WTP	100.00%
28 Indeks kearsipan daerah	83.63	69.84	83.51%
29 Indeks pelayanan publik	3.18	3.99	125.47%
31 Indeks Kepuasan Masyarakat	82.9	84.10	101.45%
31 Tingkat partisipasi angkatan kerja	73.28	74.19	101.24%

Berdasarkan tabel diatas dalam rata - rata kinerja sasaran pada indikator makro telah tercapai 80,22%. Meskipun secara makro tercapai 100% lebih, namun masih ada beberapa beberapa indikator sasaran strategis yang masih belum tercapai. Secara umum capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah tercapai bahkan ada beberapa target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis telah melampaui target Tahun 2025 dan bahkan melampaui target akhir periode RPJMD Tahun 2026 yang sudah ditetapkan.

Adapun 8 indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih tercapai 3,97%, Persentase RDTR tercapai 11,11%, Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban



Bencana Kabupaten, Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani.

2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai target kinerja sasaran sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Secara spesifik tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian kinerja sasaran tahun sebelumnya disebabkan adanya perbedaan tujuan dan sasaran indikator pada periode RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029. Untuk memberikan gambaran umumnya terhadap pencapaian sasaran indikator tahun 2025 maka akan diperbandingkan dengan data awal periode RPJMD 2021-2026.

Berikut disampaikan perbandingan hasil capaian indikator kinerja tahun 2024 dan tahun 2025.

Tabel. 3.3.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran

Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Progres
1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	0,00%
2. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	86			
3. Indeks Resiko Bencana	118,9	135,17	137,63	1,82%
4. Indeks Pembangunan Kebudayaan	78			
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,4%	3,92%	2,22%	-43,37%
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,4%	5,79%	5,10%	-11,92%
7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,78%	3,63%	1,38%	-61,98%
8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,53%			
9. Jumlah Desa Mandiri	61 desa	102 desa	114 desa	11,76%



Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Progres
10. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	38,45%	52,15%	28,09%	-46,14%
11. Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	19,99%	2,85%	3,97%	39,30%
12. Nilai Realisasi Investasi	615,63 Milyar	907,84 Milyar	894,79 Milyar	-1,44%
13. Persentase Usaha Mikro	93,52%	99,93%	99,91%	-0,02%
14. Persentase Koperasi Aktif	48,25%	47,54%	54,61%	14,87%
15. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,96	79,79	82,82	3,80%
16. Persentase RDTR	52,17%	4,35%	11,11%	155,40%
17. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,92 tahun	12,23 tahun	12,24 tahun	0,08%
18. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,39 tahun	8,03 tahun	8,04 tahun	0,12%
19. Angka Harapan Hidup	73,35 tahun	73,49 tahun	73,69 tahun	0,27%
20. Pengeluaran Perkapita	7.842.000 Rp/ Kapita/Thn	8.470.000 Rp/ Kapita/Thn	8.765.000 Rp/ Kapita/Thn	3,48%
21. Nilai SAKIP	BB	B	B	100%
22. Indeks Kepuasan Masyarakat	80,9	83,63	84,10	0,56%
23. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%
24. Predikat SPBE	Baik	Baik	Baik	100%
25. Predikat KIP	Informatif	Informatif	Informatif	100%
26. Level Maturitas SPIP	3	3,01	3,01	100%
27. Indeks Profesionalitas ASN	49,5	76,64	67,43	-12,02%
28. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	76%	34,25%	34,77%	1,52%
29. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	67%	28,62%	28,89%	0,94%
30. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	84,2%	58,52%	58,29%	-0,39%
31. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	79,83%	78,65%	79,08%	0,55%
32. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	83,66%	77,71%	78,23%	0,67%
33. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	100%	100%	0	-100%
34. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani	62,75%	6,06%	0	-100%
35. Resiko Konektivitas Kabupaten	75,80	69,57	53,8	-22,67%
36. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	83	84,04	84,34	0,36%
37. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	76	85,18	84,92	-0,31%



Dari tabel 3.3. diatas dapat dilihat bahwa terdapat 11 indikator dari seluruh IKU yang mengalami penurunan capaian kinerja pada tahun 2025, indikator tersebut adalah: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan, Laju Pertumbuhan Ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Nilai Realisasi Investasi, Persentase Usaha Mikro, Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum, Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten, Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani, Resiko Konektivitas Kabupaten, dan Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana.

2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

Target Kinerja Indikator Sasaran ditetapkan dalam RPJMD selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2026, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya selama tahun berjalan, setiap tahunnya ditetapkan Perjanjian Kinerja bagi setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya untuk mencapai target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dibandingkan dengan target dalam RPJMD.



Tabel. 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Berdasarkan RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya			
	1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100%
	2. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	88		
	3. Indeks Resiko Bencana	116,3	137,63	81,66%
	4. Indeks Pembangunan Kebudayaan	80		
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan			
	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,50%	2,22%	148%
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,20%	5,10%	121,43%
	3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,98%	1,38%	23,08%
	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5,58%		
3	Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri			
	1. Jumlah Desa Mandiri	67 desa	114 desa	170,15%
4	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka			
	1. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	39,12%	28,09%	71,80%
	2. Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	20,82%	3,97%	19,07%
	3. Nilai Realisasi Investasi	620,20 Milyar	894,79 Milyar	144,27%
	4. Persentase Usaha Mikro	93,72%	99,91%	106,60%
	5. Persentase Koperasi Aktif	51,36%	54,61%	106,33%
4	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
	1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,05	82,82	110,35%
	2. Persentase RDTR	65,22%	11,11%	17,03%
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,04 tahun	12,24 tahun	93,87%
	2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,54 tahun	8,04 tahun	94,15%
	3. Angka Harapan Hidup	73,51 tahun	73,69 tahun	100,24%
	4. Pengeluaran Perkapita	7.963.000 Rp/ kapita/thn	8.765.000 Rp/ Kapita/Thn	110,07%



No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
6	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			
	1. Nilai SAKIP	A	B	87,49%
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	81	84,10	103,83%
	3. Opini BPK	WTP	WTP	100%
	4. Predikat SPBE	Baik	Baik	100%
	5. Predikat KIP	Informatif	Informatif	100%
	6. Level Maturitas SPIP	3	3,01	100,33%
	7. Indeks Profesionalitas ASN	50	67,43	134,86%
7	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			
	1. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	79%	34,77%	44,01%
	2. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	69%	28,89%	41,87%
	3. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	87,03%	58,29%	66,98%
	4. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	82,64%	79,08%	95,69%
	5. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	86,66%	78,23%	90,27%
	6. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	100%	100	100%
	7. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani	69,05%	0	0%
	8. Resiko Konektivitas Kabupaten	80,70	53,8	66,67%
8	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat			
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	85	84,34	99,22%
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	80	84,92	106,15%

2.3.5. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD, dilaksanakan program dan kegiatan dengan menggunakan sumber



daya yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tabel. 3.5.
Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun Anggaran 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 908.959.779.450,00	Rp. 795.371.502.835,43	87,50
2 Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 54.003.717.183,00	Rp. 5.588.453.458,00	10,35
3 Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 109.940.100,00	Rp. 107.116.270,00	97,43
4 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 310.384.000,00	Rp. 307.988.130,00	99,23
5 Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 1.084.014.500,00	Rp. 1.082.042.367,00	99,82
6 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 2.898.655.000,00	Rp. 2.897.355.500,00	99,96
7 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 285.924.500,00	Rp. 285.430.800,00	99,83
8 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 67.512.566.285,00	Rp. 57.396.474.383,44	85,02
9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 7.805.963.975,00	Rp. 7.013.334.570,00	89,85
10 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 51.270.000,00	Rp. 49.121.100,00	95,81
11 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 280.728.000,00	Rp. 246.817.500,00	87,92
12 Program Pengendalian Penduduk	Rp. 623.700.000,00	Rp. 429.307.780,00	68,83
13 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 4.167.769.000,00	Rp. 2.932.951.828,00	70,37
14 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 3.303.100.000,00	Rp. 3.189.679.999,00	96,57
15 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 217.846.916,00	Rp. 217.410.000,00	99,80
16 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 9.132.391.000,00	Rp. 8.252.510.950,00	90,37
17 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 6.661.470.000,00	Rp. 6.658.065.563,00	99,95
18 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 67.000.000,00	Rp. 66.930.000,00	99,90



	Program	Anggaran	Realisasi	%
19	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 9.162.317.000,00	Rp. 9.149.955.580,00	99,87
20	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 15.938.036.642,00	Rp. 15.918.971.000,00	99,88
21	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 310.800.000,00	Rp. 308.485.500,00	99,26
22	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 370.000.000,00	Rp. 351.902.149,00	95,11
23	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 42.416.800,00	Rp. 42.239.345,00	99,58
24	Program Kawasan Permukiman	Rp. 147.998.000,00	Rp. 147.105.508,00	99,40
25	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 297.972.000,00	Rp. 290.709.489,00	97,56
26	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 48.793.600,00	Rp. 46.098.780,00	94,48
27	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp. 11.791.000,00	Rp. 7.421.000,00	62,94
28	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp. 55.712.000,00	Rp. 52.939.456,00	95,02
29	Program Penetapan Tanah Ulayat	Rp. 38.081.800,00	Rp. 35.078.501,00	92,11
30	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 46.299.500,00	Rp. 44.623.397,00	96,38
31	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 224.863.300,00	Rp. 223.790.406,00	99,52
32	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 608.662.500,00	Rp. 593.603.582,00	97,53
33	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 58.427.000,00	Rp. 58.315.333,00	99,81
34	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)	Rp. 191.431.900,00	Rp. 191.298.033,00	99,93
35	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Rp. 42.860.300,00	Rp. 42.447.034,00	99,04
36	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 5.535.000,00	Rp. 5.431.419,00	98,13
37	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 2.206.001.634,00	Rp. 2.199.398.166,00	99,70
38	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 486.734.200,00	Rp. 477.081.348,00	98,02
39	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 149.527.000,00	Rp. 149.199.000,00	99,78
40	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Rp. 89.076.000,00	Rp. 89.008.822,00	99,92



	Program	Anggaran	Realisasi	%
	Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
41	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 177.690.000,00	Rp. 159.637.500,00	89,84
42	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 2.429.000,00	Rp. 201.000,00	8,28
43	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 443.414.000,00	Rp. 430.126.089,00	97,00
44	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	66.388.200,00	Rp. 60.997.400,00	91,88
45	Program Penanganan Bencana	Rp. 64.538.700,00	Rp. 62.969.600,00	97,57
46	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 26.400.000,00	Rp. 26.400.000,00	100,00
47	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 24.780.000,00	Rp. 23.847.600,00	96,24
48	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 19.015.000,00	Rp. 18.217.500,00	95,81
49	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 95.541.000,00	Rp. 94.160.000,00	98,55
50	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 26.748.500,00	Rp. 26.641.500,00	99,60
51	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 28.258.500,00	Rp. 28.252.000,00	99,98
52	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 67.398.700,00	Rp. 67.021.750,00	99,44
53	Program Hubungan Industrial	Rp. 577.499.580,00	Rp. 456.108.380,00	78,98
54	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 994.886.200,00	Rp. 993.102.961,00	99,82
55	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 129.796.400,00	Rp. 129.795.900,00	100,00
56	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 70.204.000,00	Rp. 70.136.520,00	99,90
57	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 224.297.000,00	Rp. 215.836.720,00	96,23
58	Program Pencatatan Sipil	Rp. 209.956.000,00	Rp. 207.220.669,00	98,70
59	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 65.600.000,00	Rp. 65.322.000,00	99,58
60	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 34.603.500,00	Rp. 33.714.281,00	97,43
61	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 365.998.820,00	Rp. 364.693.840,00	99,64
62	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 5.747.196.125,00	Rp. 5.733.040.267,00	99,75
63	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 2.438.323.055,00	Rp. 2.429.912.781,00	99,66
64	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 59.086.000,00	Rp. 59.006.000,00	99,86
65	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 175.751.370,00	Rp. 172.196.711,00	97,98



	Program	Anggaran	Realisasi	%
66	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 217.874.700,00	Rp. 208.652.880,00	95,77
67	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 49.390.000,00	Rp. 47.486.910,00	96,15
68	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 42.292.600,00	Rp. 41.471.146,00	98,06
69	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 66.945.549,00	Rp. 66.328.211,00	99,08
70	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 12.980.000,00	Rp. 12.104.000,00	93,25
71	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 70.969.684,00	Rp. 70.517.988,00	99,36
72	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 1.007.060.849,00	Rp. 1.006.266.665,00	99,92
73	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 185.668.200,00	Rp. 185.115.039,00	99,70
74	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 20.954.000,00	Rp. 20.761.992,00	99,08
75	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 116.038.000,00	Rp. 115.012.742,00	99,12
76	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 75.012.200,00	Rp. 74.312.704,00	99,07
77	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 27.936.000,00	Rp. 27.411.750,00	98,12
78	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 35.030.000,00	Rp. 34.966.185,00	99,82
79	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 155.149.900,00	Rp. 154.519.565,00	99,59
80	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 3.005.882.100,00	Rp. 2.990.254.297,60	99,48
81	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 37.244.400,00	Rp. 35.514.546,00	95,36
82	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 87.755.700,00	Rp. 86.952.905,00	99,09
83	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 94.480.000,00	Rp. 92.884.936,00	98,31
84	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 76.250.000,00	Rp. 70.600.000,00	92,59
85	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 262.942.000,00	Rp. 262.929.985,00	100,00
86	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 477.160.000,00	Rp. 474.711.672,00	99,49
87	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 73.500.000,00	Rp. 73.390.500,00	99,85
88	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 704.785.125,00	Rp. 219.329.515,00	31,12



	Program	Anggaran	Realisasi	%
89	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 10.000.600,00	Rp. 9.922.800,00	99,22
90	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 25.215.000,00	Rp. 24.003.693,00	95,20
91	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 455.534.720,00	Rp. 391.070.605,00	85,85
92	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 24.392.968.700,00	Rp. 21.308.338.075,00	87,35
93	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 72.400.000,00	Rp. 71.605.425,00	98,90
94	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 15.000.000,00	Rp. 7.909.500,00	52,73
95	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 115.403.000,00	Rp. 115.403.000,00	100,00
96	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 797.406.000,00	Rp. 755.301.570,00	94,72
97	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 54.837.811.229,00	Rp. 53.700.315.074,00	97,93
98	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.652.600.800,00	Rp. 1.638.631.495,00	99,15
99	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 11.332.042.800,00	Rp. 10.309.944.700,00	90,98
100	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 684.448.000,00	Rp. 680.351.000,00	99,40
101	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 942.762.800,00	Rp. 936.991.100,00	99,39
102	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 121.530.000,00	Rp. 120.233.000,00	98,93
103	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 8.638.112.821,00	Rp. 7.200.310.693,00	83,36
104	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 756.567.628,00	Rp. 720.137.384,00	95,18
105	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.430.405.158,00	Rp. 1.387.782.412,00	97,02
106	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 2.274.872.150,00	Rp. 2.022.946.112,00	88,93
107	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 3.102.259.500,00	Rp. 3.029.391.906,25	97,65
108	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp. 73.450.000,00	Rp. 73.450.000,00	100,00
109	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.354.258.000,00	Rp. 2.349.741.990,00	99,81
110	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 333.110.000,00	Rp. 332.130.780,00	99,71
111	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 183.276.000,00	Rp. 183.176.480,00	99,95



	Program	Anggaran	Realisasi	%
112	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.487.321.100,00	Rp. 1.474.552.040,00	99,14
113	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 21.173.000,00	Rp. 21.173.000,00	100,00
114	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 87.367.000,00	Rp. 86.901.630,00	99,47
115	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 53.548.100,00	Rp. 53.458.320,00	99,83
116	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 753.035.690,00	Rp. 752.953.581,00	99,99
117	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 1.310.732.500,00	Rp. 1.260.355.300,00	96,16
118	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 54.772.000,00	Rp. 54.772.000,00	100,00
119	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 91.640.000,00	Rp. 91.400.000,00	99,74
120	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 291.821.000,00	Rp. 291.783.006,00	99,99
	Total	Rp. 1.235.801.503.038,00	Rp. 1.052.274.088.655,72	85,15

Realisasi anggaran Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025 mencapai rata-rata 85,15% dengan kategori tinggi atau terealisasi secara optimal. Angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya. Jumlah program yang dikelola pada tahun 2025 sebanyak 120 program guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

2.3.6. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian



indikator outcome sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Kapuas Hulu yang mengacu Tujuan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 dan Tujuan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2025-2029. Untuk pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2025 pada RPJMD 2021-2026 terdapat indikator makro berjumlah 7 tujuan strategis dengan 10 indikator kinerja dengan jumlah sasaran strategis sebanyak 33 sasaran strategis dengan 37 indikator kinerja, sedangkan pada RPJMD 2025-2029 terdapat indikator makro berjumlah 6 tujuan strategis dengan 7 indikator kinerja dengan jumlah sasaran strategis sebanyak 18 sasaran strategis dengan 31 indikator kinerja.

Pada evaluasi pencapaian kinerja tahun 2025 masih terdapat beberapa data yang sifatnya sementara atau tahun lalu, hal ini dilakukan karena data tersebut sampai batas periode pelaporan belum lengkap dikeluarkan oleh perangkat daerah, Badan Pusat Statistik atau Lembaga yang berwenang mengeluarkan data tersebut.

1. Evaluasi Tujuan Strategis RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026

i) Tujuan Strategis Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya

Pada tujuan strategis mewujudkan masyarakat yang aman, religius dan berbudaya diukur dengan indikator tujuan Indeks Rasa Aman dimana sampai dengan periode pelaporan belum diperoleh data. Dalam pelaksanaan Upaya untuk mewujudkan masyarakat yang aman religious dan berbudaya di jabarkan dalam beberapa sektor penanganan antara lain urusan agama, urusan kebudayaan, urusan keamanan dan ketertiban serta urusan kesatuan bangsa dalam kerangka bhineka Tunggal ika. Adapun strategi untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan religius, dilakukan dengan



meningkatkan kondusivitas wilayah dan meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerja sama antar umat beragama. Kendala permasalahan yang dihadapi secara umum tidak ditemukan, namun dalam mengukur capaian kinerja masih mengalami kendala dimana penyelenggara pengukuran indeks rasa aman belum terkoordinasi dengan baik.

ii) Tujuan Strategis Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

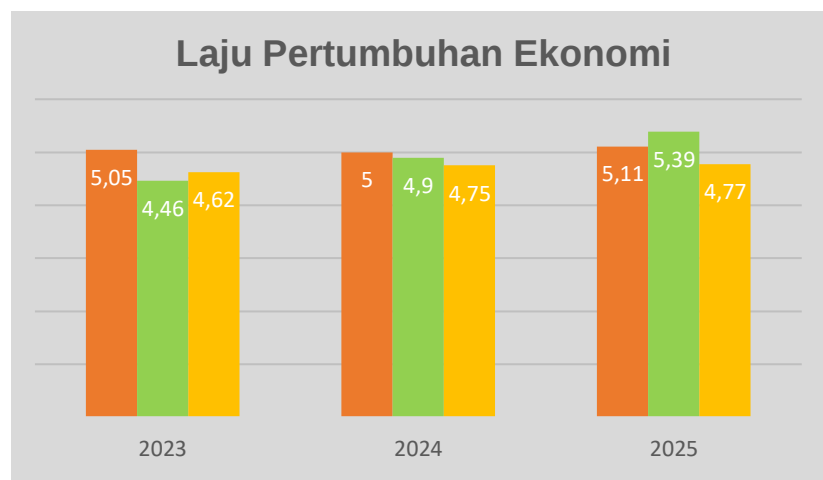
Pada tujuan strategis meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
			Target	Capaian	%	Target	%
Laju Pertumbuhan ekonomi	%	4,75	4	4,77	119,25	5	95,40
Rata-Rata Capaian Kinerja					119,25		95,40

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 sebesar 4,77% dengan pencapaian terhadap target sebesar 119,25% (sangat tinggi), dimana target yang ditetapkan dapat terlampaui, sedangkan dibanding dengan target akhir RPJMD telah mencapai 95,40%. Capaian Kinerja tahun 2025 dibanding dengan tahun 2024 mengalami peningkatan.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi kerakyatan khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu, dimana ada beberapa sektor pendukung yang berkontribusi dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi antara lain: LPE sektor industri pengolahan, LPE sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, LPE sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.



	2023	2024	2025
Nasional	5,05	5,00	5,11
Prov. Kalbar	4,46	4,90	5,39
Kab. Kapuas Hulu	4,62	4,75	4,77

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan klasifikasi capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut data BPS, bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu masih berada dibawah LPE Provinsi Kalimantan Barat maupun Nasional. Namun untuk pertumbuhan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik.

iii) Tujuan Strategis Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri

Pada Tujuan Strategis Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dengan indikator persentase desa mandiri dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada table berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Persentase Desa Mandiri	%	28,42	36,69	21,94	41,01	186,91	24,10	170,15
Rata-Rata Capaian Kinerja						186,91		170,15

Sumber: Kemendes



Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja tujuan strategis meningkatnya jumlah desa mandiri tahun 2025 sebesar 41,01% dengan pencapaian terhadap target sebesar 186,91 (sangat tinggi), dimana target yang ditetapkan dapat terlampaui, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD target kinerja telah mencapai 170,15% dan melampaui target akhir RPJMD. Capaian Kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Desa mandiri merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kegiatan untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) kategori mandiri. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kemendes dan PDTT pada tahun 2025 terdapat peningkatan status desa Kabupaten Kapuas Hulu antara lain sebanyak 2 Desa berkembang mengalami peningkatan status menjadi Desa Mandiri, 28 Desa berkembang mengalami peningkatan status menjadi Desa Maju, 21 Desa maju mengalami peningkatan status menjadi Desa Mandiri dan terdapat 30 Desa mengalami peningkatan status menjadi Desa Mandiri.

Jika dibandingkan dengan Desa secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 278 Desa maka sampai dengan tahun 2025 mencapai 41,01% Desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan social, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi/ lingkungan yang berkelanjutan.

iv) Tujuan Strategis Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka

Pada Tujuan Strategis Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka mempunyai dua indikator kinerja antara lain Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada table berikut:

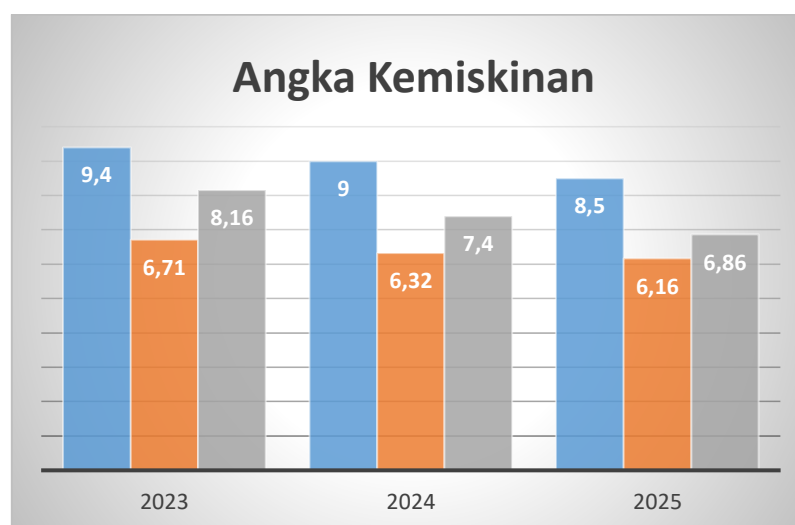


Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Tingkat Kemiskinan	%	8,16	7,40	7,33	6,86	106,41	7,08	103,11
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,19	2,18	3,17	2,09	134,07	3	130,33
Rata-Rata Capaian Kinerja						120,24		116,72

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan menjadi fokus yang diintervensi oleh pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Untuk melihat capaian indikator kemiskinan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 seperti yang terlihat dalam tabel diatas menunjukkan garis kemiskinan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 mengalami penurunan. Tahun 2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu berada pada level 8,16% dan tahun 2024 mengalami penurunan di level 8,16 dan pada tahun 2024 ditargetkan kemiskinan turun pada level 7,40% dan realisasi tingkat kemiskinan tahun 2025 berada pada level 6,86% dengan hasil pencapaian 106,41% dari target tahun 2025.

Penurunan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 ini linear dengan penurunan di level Provinsi dan Nasional. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah:



	2023	2024	2025
Nasional	9,4	9,0	8,5
Prov. Kalbar	6,71	6,32	6,16
Kab. Kapuas Hulu	8,16	7,40	6,86

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Seperti yang terlihat pada tabel bahwa capaian angka kemiskinan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025 di level 6,86%, masih berada diatas Provinsi Kalimantan Barat di level 6,16% namun berada dibawah Nasional sebesar 8,5% sehingga Kabupaten Kapuas Hulu masuk sebagai *pilot project* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan pada tahun 2022.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan Langkah-langkah strategi melalui refocusing belanja APBD tahun 2025 untuk diarahkan menanggulangi kemiskinan. Adapun strategi yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan melalui tiga strategi antara lain mengurangi beban pengeluaran masyarakat khususnya masyarakat yang sangat miskin seperti penyaluran bantuan social seperti PKH, BPNT serta PBI. Basis data yang digunakan dalam menetapkan sasaran kemiskinan ekstrem menggunakan data P3KE dan dilakukan sinkronisasi data terpadu

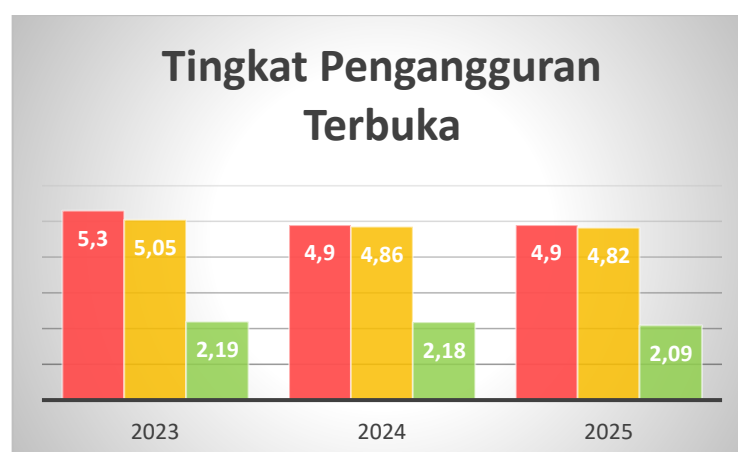


kesejahteraan social (DTKS) yang terupdate setiap bulan, guna memastikan sasaran penerima bantuan social tepat sasaran.

Strategi lainnya yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui beberapa peningkatan kapasitas masyarakat miskin seperti menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat miskin baik secara individu maupun yang tergabung dalam kelompok usaha kecil menengah kebawah. Selain itu strategi yang selanjutnya dengan mengurangi kantong-kantong kemiskinan pada lokasi prioritas melalui penyediaan pelayanan dasar seperti pelayanan Kesehatan, pelayanan Pendidikan dan peningkatan fasilitas penunjang infrastruktur yang memadai.

Pada indikator Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Kapuas Hulu seperti terlihat pada tabel diatas terjadi penurunan pada tahun 2022 ke tahun 2023, dimana Tahun 2022 Tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,21% sementara pada tahun 2023 turun pada level 2,19%. Sedangkan untuk capaian tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 2,18%, dengan tingkat capaian dibanding dengan target sebesar 134,73%.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka linear dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka pada provinsi Kalimantan Barat dan Nasional. Seperti terlihat pada tabel berikut:



	2023	2024	2025
Nasional	5,3	4,9	4,9
Prov. Kalbar	5,05	4,86	4,82
Kab. Kapuas Hulu	2,19	2,18	2,09



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Seperti terlihat pada tabel bahwa pencapaian kinerja pada Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025 sebesar 2,09% dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Provinsi Kalimantan Barat sebesar 4,82%, sedangkan untuk Tingkat Pengangguran terbuka pada Tingkat Nasional sebesar 4,9%.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan upaya strategis dalam rangka menurunkan angka pengangguran melalui beberapa kebijakan antara lain dengan meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja melalui pelatihan bagi pencari kerja dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas para pencari kerja. Selain itu juga dengan memberdayakan kualitas koperasi dan pelaku usaha mikro agar lebih mandiri, produktif serta berdaya saing melalui pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Upaya strategis yang lain dalam mendorong produktivitas dan daya saing bagi pelaku usaha mikro, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan Upaya meningkatkan peluang investasi daerah dengan berfokus pada peningkatan kemandirian pelaku usaha mikro.

v) Tujuan Strategis Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada Tujuan Strategis Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada table berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Predikat indeks kualitas lingkungan hidup	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	100	Baik	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						100		100

Sumber: Kementerian LHK



Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian predikat indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dengan predikat Baik dengan capaian dibandingkan dengan target sebesar 100%. Sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100%. Beberapa Upaya strategis yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan Meningkatkan komitmen dalam menjaga kualitas Air, kualitas Udara dan Kualitas tutupan Lahan.

vi) Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia

Pada Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Indeks Pembangunan Manusia		67,86	68,77	68,66	69,24	100,84	69,17	100,10
Rata-Rata Capaian Kinerja						100,84		100,10

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja tujuan strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia tahun 2025 sebesar 69,24 dengan pencapaian terhadap target sebesar 100,84%, dimana target yang ditetapkan terlampaui, sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 kinerja telah mencapai 100,10%. Capaian Kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun



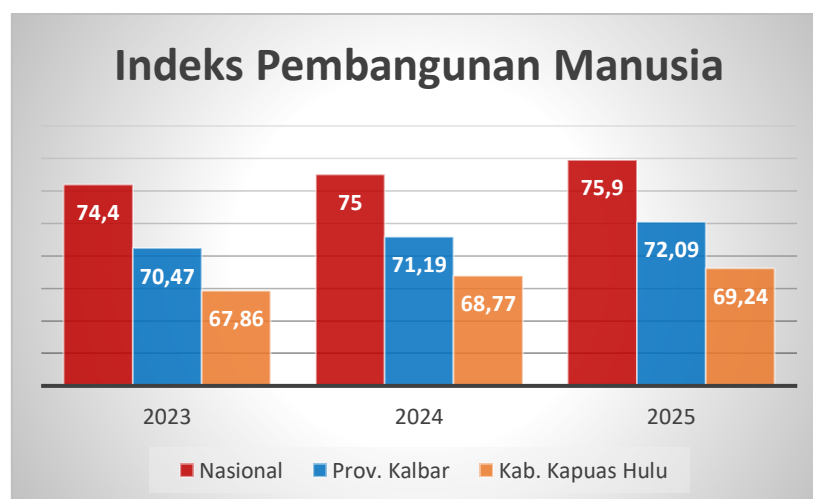
kualitas hidup manusia yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Indikator dimensi IPM terdiri dari umur harapan hidup (UHH), Harapan lama sekolah (HLS), Rata-rata lama sekolah (RLS), dan Paritas daya beli (Pengeluaran Riil perkapita yang disesuaikan). Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kapuas Hulu
menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020-2025

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Harapan Hidup	72,5	72,5	72,7	72,9	73,5	73,69
Harapan Lama Sekolah	12,1	12,1	12,1	12,2	12,23	12,24
Rata-rata Lama Sekolah	7,52	7,5	7,6	7,8	8,03	8,04
Pengeluaran Perkapita	7,162	7,168	7,668	8,055	8,470	8,765

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan kalisifikasi capaian IPM menurut BPS, Kabupaten Kapuas Hulu masih berada dibawah nilai IPM Provinsi Kalimantan Barat maupun Nasional. Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut:



	2023	2024	2025
Nasional	74,4	75	75,9
Prov. Kalbar	70,47	71,19	72,09
Kab. Kapuas Hulu	67,86	68,77	69,24

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

IPM Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun
2023-2025



vii) Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pada Tujuan Strategis Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada table berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	BB	B			BB	
Rata-Rata Capaian Kinerja								

Sumber: KemenpanRB

Pada tabel diatas, kinerja pada tujuan strategis meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 belum dikeluarkan secara resmi nilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Indeks Reformasi Birokrasi sejak tahun 2023 terus mengalami peningkatan, dan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2024 yaitu predikat BB.

Reformasi Birokrasi merupakan Upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan, serta perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek Kelembagaa, ketatalaksanaan dan sumberdaya aparatur. Pencapaian Refromasi Birokrasi diukur dengan indeks reformasi Birokrasi yang merupakan Tingkat pencapaian instansi pemerintah dalam menyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Namun dalam perkembangannya Pemerintah pusat melalui kemeterian PANRB menerbitkan Peraturan MenpanRB nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang



mana harus dilaksanakan juga pada level Mikro yaitu Instansi Pemerintah termasuk Kabupaten Kapuas Hulu.

Perubahan Roadmap ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Kapuas Hulu, dimana terdapat perubahan konsep penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang sangat signifikan yang menyebabkan Kabupaten Kapuas Hulu harus melakukan perubahan terhadap Road Map dan Menyusun rencana aksi yang Baru sehingga memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya, sehingga capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 tidak dapat naik secara signifikan.

Strategi yang dilaksanakan dalam meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi terfokus pada pelaksanaan rencana aksi yang lebih berdampak.

viii) Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pada Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	-	83,5	83,5	77	82.78	104,13	82.5	100.34
Rata-Rata Capaian Kinerja						104,13		100.34

Sumber: Laporan SKM Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Kesehatan pada tahun 2025 sebesar 104,13% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100,34%.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat



masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui Tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Berdasarkan hasil Survei kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kabupaten Kapuas Hulu Melalui Dinas Kesehatan diperoleh Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan Kesehatan pada tahun 2024 sebesar 82,78.

2. Evaluasi Tujuan Strategis RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029

i) Tujuan Strategis Mewujudkan Masyarakat yang Aman

Pada tujuan strategis mewujudkan masyarakat yang aman, religius dan berbudaya diukur dengan indikator tujuan Indeks Rasa Aman dimana sampai dengan periode pelaporan belum diperoleh data. Dalam pelaksanaan Upaya untuk mewujudkan masyarakat yang aman religius dan berbudaya di jabarkan dalam beberapa sektor penanganan antara lain urusan agama, urusan kebudayaan, urusan keamanan dan ketertiban serta urusan kesatuan bangsa dalam kerangka bhineka Tunggal ika. Adapun strategi untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan religius, dilakukan dengan meningkatkan kondusivitas wilayah dan meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerja sama antar umat beragama. Kendala permasalahan yang dihadapi secara umum tidak ditemukan, namun dalam mengukur capaian kinerja masih mengalami kendala dimana penyelenggara pengukuran indeks rasa aman belum terkoordinasi dengan baik.

ii) Tujuan Strategis Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan

Pada tujuan strategis meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

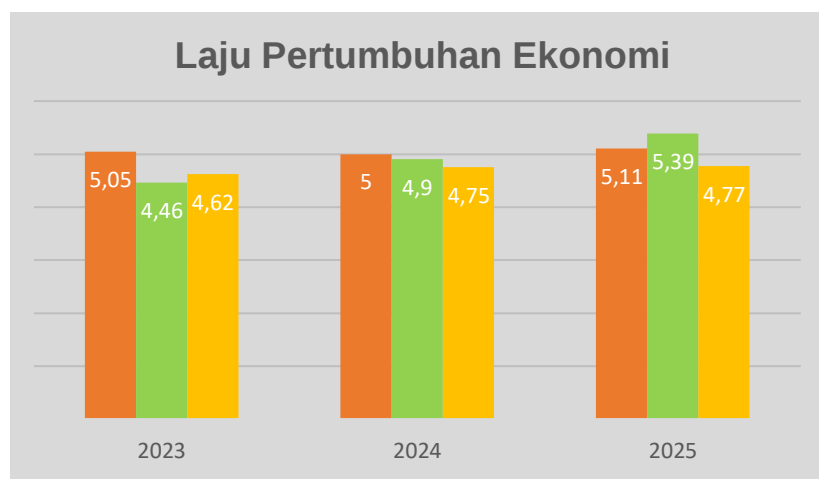


Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Laju Pertumbuhan ekonomi	%	4,75	4,72	4,77	101,06	5,12	93,16
Rata-Rata Capaian Kinerja					101,06		93,16

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 sebesar 4,77% dengan pencapaian terhadap target sebesar 101,06% (sangat tinggi), dimana target yang ditetapkan dapat terlampaui, sedangkan dibanding dengan target akhir RPJMD telah mencapai 93,16%. Capaian Kinerja tahun 2025 dibanding dengan tahun 2024 mengalami peningkatan.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi kerakyatan khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu, dimana ada beberapa sektor pendukung yang berkontribusi dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi antara lain: LPE sektor industri pengolahan, LPE sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, LPE sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.





	2023	2024	2025
Nasional	5,05	5,00	5,11
Prov. Kalbar	4,46	4,90	5,39
Kab. Kapuas Hulu	4,62	4,75	4,77

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan klasifikasi capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut data BPS, bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu masih berada dibawah LPE Provinsi Kalimantan Barat maupun Nasional. Namun untuk pertumbuhan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik.

iii) Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan

Pada Tujuan Strategis Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada table berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2029)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Predikat indeks kualitas lingkungan hidup	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	100	Baik	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						100		100

Sumber: Kementerian LHK

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian predikat indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dengan predikat Baik dengan capaian dibandingkan dengan target sebesar 100%. Sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 100%. Beberapa Upaya strategis yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan Meningkatkan komitmen dalam menjaga kualitas Air, kualitas Udara dan Kualitas tutupan Lahan.



iv) Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia

Pada Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2029)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Indeks Pembangunan Manusia		67,86	68,77	69,68	69,24	99,37	73,32	94,44
Rata-Rata Capaian Kinerja						99,37		94,44

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja tujuan strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia tahun 2025 sebesar 69,24 dengan pencapaian terhadap target sebesar 99,37%, dimana target yang ditetapkan terlampaui, sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 kinerja telah mencapai 94,44%. Capaian Kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Indikator dimensi IPM terdiri dari umur harapan hidup (UHH), Harapan lama sekolah (HLS), Rata-rata lama sekolah (RLS), dan Paritas daya beli (Pengeluaran Riil perkapita yang disesuaikan). Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

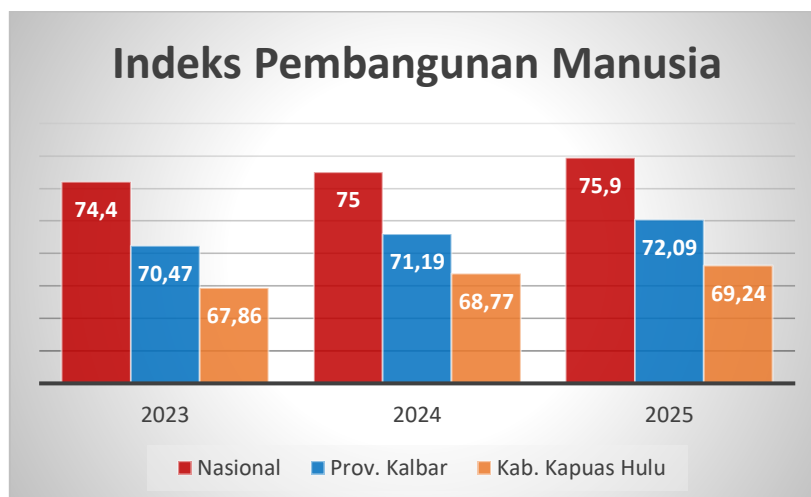


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kapuas Hulu menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020-2025

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Harapan Hidup	72,5	72,5	72,7	72,9	73,5	73,69
Harapan Lama Sekolah	12,1	12,1	12,1	12,2	12,23	12,24
Rata-rata Lama Sekolah	7,52	7,5	7,6	7,8	8,03	8,04
Pengeluaran Perkapita	7,162	7,168	7,668	8,055	8,470	8,765

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan kalisifikasi capaian IPM menurut BPS, Kabupaten Kapuas Hulu masih berada dibawah nilai IPM Provinsi Kalimantan Barat maupun Nasional. Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut:



	2023	2024	2025
Nasional	74,4	75	75,9
Prov. Kalbar	70,47	71,19	72,09
Kab. Kapuas Hulu	67,86	68,77	69,24

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

IPM Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2022-2024

v) Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pada Tujuan Strategis Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada table berikut:



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2029)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	BB	BB	BB	100	BB	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						100		100

Sumber: KemenpanRB

Pada tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 sebesar 100% sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 100%. Indeks Reformasi Birokrasi sejak tahun 2023 terus mengalami peningkatan, dan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2025 yaitu predikat BB.

Reformasi Birokrasi merupakan Upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan, serta perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek Kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya aparatur. Pencapaian Refromasi Birokrasi diukur dengan indeks reformasi Birokrasi yang merupakan Tingkat pencapaian instansi pemerintah dalam menyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Namun dalam perkembangannya Pemerintah pusat melalui kementerian PANRB menerbitkan Peraturan MenpanRB nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang mana harus dilaksanakan juga pada level Mikro yaitu Instansi Pemerintah termasuk Kabupaten Kapuas Hulu.

Perubahan Roadmap ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Kapuas Hulu, dimana terdapat perubahan konsep penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang sangat signifikan yang menyebabkan Kabupaten Kapuas Hulu harus melakukan perubahan terhadap Road Map dan Menyusun rencana aksi yang Baru sehingga memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya, Namun melalui beberapa upaya strategis yang kita lakukan dalam



meningkatkan pelaksanaan rencana aksi yang lebih optimal dan berdampak, sehingga pada tahun 2024 Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan predikat BB.

vi) Tujuan Strategis Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat Kapuas Hulu

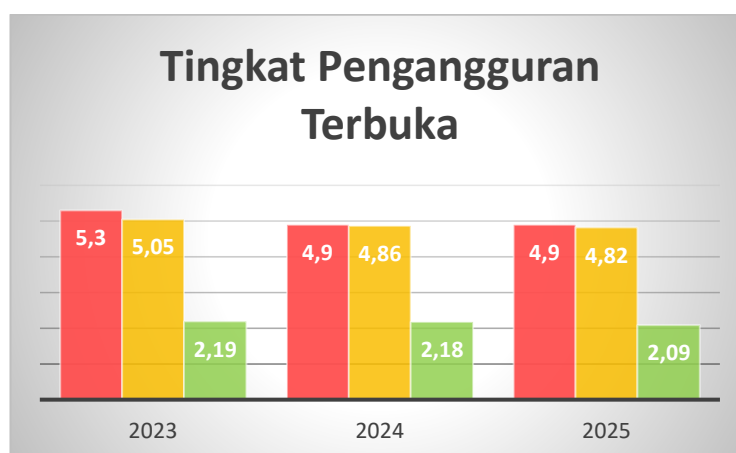
Pada Tujuan Strategis Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat Kapuas Hulu dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada table berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2029)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,19	2,18	2,18	2,09	104,13	2,14	102,34
Rata-Rata Capaian Kinerja						104,13		102,34

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Pada indikator Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Kapuas Hulu seperti terlihat pada tabel diatas terjadi penurunan pada tahun 2023 ke tahun 2024, dimana Tahun 2023 Tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,19% sementara pada tahun 2024 turun pada level 2,18%. Sedangkan untuk capaian tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yaitu sebesar 2,09%, dengan tingkat capaian dibanding dengan target sebesar 104,13%.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka linear dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka pada provinsi Kalimantan Barat dan Nasional. Seperti terlihat pada tabel berikut:



	2023	2024	2025
Nasional	5,3	4,9	4,9
Prov. Kalbar	5,05	4,86	4,82
Kab. Kapuas Hulu	2,19	2,18	2,09

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Seperti terlihat pada tabel bahwa pencapaian kinerja pada Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025 sebesar 2,09% dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Provinsi Kalimantan Barat sebesar 4,82%, sedangkan untuk Tingkat Pengangguran terbuka pada Tingkat Nasional sebesar 4,9%.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan Upaya strategis dalam rangka menurunkan angka pengangguran melalui beberapa kebijakan antara lain dengan meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja melalui pelatihan bagi pencari kerja dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas para pencari kerja. Selain itu juga dengan memberdayakan kualitas koperasi dan pelaku usaha mikro agar lebih mandiri, produktif serta berdaya saing melalui pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Upaya strategis yang lain dalam mendorong produktivitas dan daya saing bagi pelaku usaha mikro, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan Upaya meningkatkan peluang investasi daerah dengan berfokus pada peningkatan kemandirian pelaku usaha mikro.



3. Evaluasi Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026

i) Sasaran Meningkatnya Kondusivitas Wilayah

Pada Sasaran Meningkatnya Kondusivitas wilayah dengan indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum. Hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						100		100

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2025 sebesar 100% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100%. Berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, melalui beberapa tahapan antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penegakan disiplin terhadap Peraturan Daerah guna menciptakan kondusivitas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

ii) Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Resiko Bencana

Pada sasaran strategis meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dengan indikator Indeks Resiko Bencana, dengan hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Indeks Risiko Bencana	Indeks	141,01	135,17	118,90	137,63	84,25	116,3	81,66
Rata-Rata Capaian Kinerja						84,25		81,66

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Indeks Resiko Bencana pada tahun 2025 sebesar 84,25% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 81,66%. Indeks Resiko Bencana dilakukan penghitungan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan input data yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaporkan secara periodik. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2025 sebesar 118,90. Dimana semakin tinggi capaian Indeks Resiko Bencana maka semakin tinggi juga resiko bencana yang terjadi di Kapuas Hulu. Jika dilihat dalam periode 2023-2025, skor Indeks Risiko Bencana mengalami kenaikan dan pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dikarenakan pemenuhan salah satu indikator IKD yaitu adanya pembuatan draft Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kapuas Hulu. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan skor IRBI Kabupaten Kapuas Hulu, melalui sosialisasi dan pendampingan serta pelatihan kepada masyarakat dalam menanggulangi bencana. Sebagai rekomendasi teknis bahwa mengingat Dokumen Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Kapuas Hulu yang diterbitkan oleh BNPB berakhir pada tahun 2021 atau telah kadaluarsa masa berlakunya maka perlu menyusun dan menetapkan Kajian Resiko Bencana guna memenuhi salah satu komponen utama dalam indikator kapasitas penurunan indeks resiko bencana.



iii) Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Kategori Mandiri

Pada sasaran strategis meningkatnya jumlah desa dengan IDM Kategori Mandiri dengan indikator Jumlah Desa Mandiri, dengan hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Jumlah Desa Mandiri	Desa	79	102	61	114	186,89	67	170,15
Rata-Rata Capaian Kinerja						186,89		170,15

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Jumlah Desa mandiri pada tahun 2025 sebesar 186,89% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 170,15%. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.



Adapun capaian status kemandirian desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 dengan jumlah desa seluruhnya sebanyak 278 desa jika dibandingkan antara target sebanyak 61 desa dengan realisasi sebanyak 114 desa maka capaian desa yang memiliki status mandiri akhir tahun 2025 mencapai 186,89%.

Dalam rangka meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai kewenangan membangun desa dan desa membangun melakukan intervensi terhadap Indikator IDM yang masih kurang melalui program kegiatan pada OPD-OPD terkait, dan mendorong pihak swasta serta mendorong peran desa itu sendiri melalui kewenangan desa (desa membangun)

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berbagai upaya pemberdayaan masyarakat guna mendorong masyarakat desa dalam membangun desa. Adapun pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berupa pembinaan pengelolaan keuangan desa, pembinaan pengelolaan aset desa, pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa agar tercipta perangkat desa yang terampil, responsibilitas dan akuntabilitas, fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa guna meminimalisir konflik antar desa. Peningkatan ekonomi masyarakat juga terus dilakukan dengan memberikan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan peningkatan kerjasama desa serta fasilitasi terhadap tim PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.



iv) Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

Pada sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan social dengan indikator persentase pelayanan kesejahteraan sosial, dengan hasil capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Persentase pelayanan kesejahteraan sosial	%	30,72	52,15	38,45	28,09	73,06	39,12	71,80
Rata-Rata Capaian Kinerja						73,06		71,80

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis persentase pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 2025 sebesar 73,06% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 71,80%. Adapun data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kapuas Hulu yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 39.166 orang dari jumlah penduduk miskin secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 139.423. Bantuan sosial yang diberikan untuk mengurangi kemiskinan secara ekstrem yang diberikan berupa Program Keluarga Harapan (PKH); Bantuan Pangan non tunai (BPNT/Sembako); Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah, Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang mendapat bantuan biaya rawat inap di RSJ Singkawang dan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) pasca rehabilitasi di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Cahaya Borneo, Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang mendapat bantuan permakanan di rumah singgah, Bantuan reunifikasi dan rujukan bagi orang terlantar, bantuan alat bantu dan sembako untuk penyandang disabilitas yang kurang mampu, bantuan sembako untuk lansia yang kurang mampu, bantuan perlengkapan sekolah bagi yatim, piatu dan yatim piatu yang kurang mampu, serta bantuan sembako dan sandang bagi korban bencana social (kebakaran).



Dari realisasi tersebut didapatkan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 73,06% yang terjadi penurunan dibanding tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu :

- Perubahan basis data acuan utama Penerima Bantuan Sosial dari DTKS menjadi DTSEN pada pertengahan tahun 2025 berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. DTKS merupakan syarat penerima bansos yang berisi data induk PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan social, serta potensi dan sumber kesejahteraan social yang dikelola oleh Kementerian Sosial, sedang DTSEN Adalah gabungan data terpadu dari DTKS, Regsosek dan P3KE yang dikelola oleh BPS sehingga jumlah sasaran yang semula 95.662 (DTKS) menjadi 140.984 (DTSEN).
- DTSEN menggunakan sistem desil (tingkat kesejahteraan keluarga), dimana dari sistem pendesilan tersebut banyak penerima bantuan social yang sebelumnya menerima bantuan yang masuk pada desil 6-10 menjadi tidak menerima lagi bantuan social karena dianggap tidak layak mendapat bantuan. Hal ini mengakibatkan jumlah penerima bantuan berkurang.

v) Sasaran strategis Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja

pada sasaran strategis meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dengan indikator kinerja Persentase penempatan tenaga kerja terlatih, dengan hasil pencapaian kinerja adapat dilihat pada tabel berikut:



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Persentase penempatan tenaga kerja terlatih	%	2,87	2,85	19,99	3,97	19,86	20,82	19,07
Rata-Rata Capaian Kinerja						19,86		19,07

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Persentase penempatan tenaga kerja terlatih pada tahun 2025 sebesar 19,86% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 19,07%. Data tenaga kerja yang terdaftar dalam layanan AK-1 pada tahun 2025 sebanyak 21.172 orang. Sementara yang mendapatkan fasilitasi untuk pelatihan sebanyak 840 orang, sehingga hanya 3,97% tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikat. Kondisi ini tentu masih sangat jauh dari target yang ditetapkan, sehingga perlu Upaya yang lebih strategis agar semakin banyak tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan untuk menjadi tenaga kerja yang produktif dan siap ditempatkan. Sebagai upaya yang dapat dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu antara lain melakukan koordinasi lebih intens dengan pihak swasta yang menyediakan kesempatan kerja. Selain itu juga menyediakan akses peningkatan tenaga kerja yang produktif melalui pelatihan-pelatihan dengan jumlah yang lebih banyak dengan dukungan sumber daya anggaran yang memadai.

vi) Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Daerah

Pada Sasaran strategis meningkatnya investasi Daerah dengan indikator nilai realisasi investasi, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Nilai Realisasi Investasi	Milyar	1.404,13	907,84	615,63	894,79	145,34	620,2	144,27
Rata-Rata Capaian Kinerja						145,34		144,27

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis nilai realisasi investasi pada tahun 2025 sebesar 145,34% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 144,27%. Nilai realisasi investasi Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjumlahan dari nilai investasi berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal asing dan penanaman modal negeri.

Bahwa selama kurun waktu 2021-2025 nilai realisasi investasi berhasil melampaui target yang telah ditetapkan (di atas 100%) dari dokumen Renstra DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu periode 2021-2026. Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2024, maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan. Penurunan realisasi investasi ini dipengaruhi oleh resesi dan inflasi yang dapat menghambat aliran modal. Selain itu kenaikan dan penurunan nilai realisasi investasi di daerah dipengaruhi oleh daya tarik investasi yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) yaitu kondisi perekonomian daerah, tersedianya infrastruktur, tersedianya sumber daya manusia dan kondisi keamanan, politik dan sosial budaya serta manajemen kualitas pelayanan/ kelembagaan yang dapat dikendalikan (*controllable*).

Upaya yang telah dilakukan melalui DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka meningkatkan realisasi investasi yaitu dengan mengoptimalkan peran pengendalian penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan memberikan bimbingan teknis dan pembinaan bagi perusahaan agar dapat melaporkan perkembangan kegiatan penanaman modalnya dengan benar dan



tertib dan mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) agar memenuhi komitmen melalui kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan.

vii) Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Nilai indeks kualitas lingkungan hidup, dengan hasil pencapaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Nilai indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	80,15	79,79	74,96	82,82	110,49	75,05	110,35
Rata-Rata Capaian Kinerja						110,49		110,35

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Nilai indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2025 sebesar 110,49% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 110,35%. Berdasarkan data realisasi indikator sasaran nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 sebesar 82,82 dengan kategori Sedang. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati adalah 74,96, dengan capaian 110,49%. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan Kualitas Lingkungan Hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor S.276/SETPPKL/PEHKT/DTN.02/B/12/2024 tanggal 6 Desember 2025 Tentang Penyampaian Hasil Terkini Nilai IKLH Tahun 2025, IKLH terdiri dari 3 (tiga) indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 70,25 (sedang), Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 87,23 (baik) dan Indeks Tutupan Lahan (IKL) dengan bobot 96,24



(baik). Berdasarkan Capaian Kinerja pada IKA, IKU dan IKL tahun 2025 tersebut, diperoleh IKLH Kabupaten tahun 2025 sebesar 82,82 atau kategori Sedang. Nilai ini telah memenuhi target pada tahun 2025 bahkan melebihi target tahun 2025 dan juga melebihi target akhir RPJMD tahun 2026.

viii) Sasaran Strategis Meningkatnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang

Pada sasaran strategis meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang dengan indikator kinerja Persentase RDTR, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Persentase RDTR	%	4,35	4,35	52,17	11,11	21,30	65,22	17,03
Rata-Rata Capaian Kinerja						21,30		17,03

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Persentase RDTR pada tahun 2025 sebesar 21,30% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 17,03%. Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan karena beberapa hal antara lain:

- Rencana RDTR perkotaan di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 23 kota Kecamatan;
- Target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 52,17% untuk 9 Kecamatan;
- Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berhasil ditetapkan adalah RDTR Kota Putussibau Utara (11,11%), sedangkan untuk kecamatan lain masih dalam proses pemenuhan syarat substansi yaitu penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;



Beberapa langkah strategis yang dapat diupayakan dalam penetapan RDTR kecamatan lainnya dengan melakukan koordinasi intens dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu terhadap perkembangan proses pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sehingga bisa didorong untuk dapat segera di selesaikan.

ix) Sasaran Strategis Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dan Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah

Pada sasaran strategis meningkatnya harapan lama sekolah dan meningkatnya rata-rata lama sekolah dengan indikator Harapan Lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS), hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Harapan Lama sekolah	Tahun	12,2	12,23	12,92	12,24	94,74	13,04	93,87
Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,8	8,03	8,39	8,04	95,83	8,54	94,15
Rata-Rata Capaian Kinerja						95,28		94,01

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Harapan Lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2025 sebesar 94,70% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 93,87%. Hal ini bisa diartikan bahwa target harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tahun 2025 sudah tercapai. Peningkatan ini tidak lepas dari peran serta dari pemerintah dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu melalui program beasiswa dan biaya operasional sekolah (BOS) dan program pemerintah lainnya mampu berkontribusi dalam mengurangi beban biaya sekolah bagi orang tua siswa. Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu telah



menunjukkan keberhasilan dan peningkatan, yang dapat digambarkan melalui capaian indikator Kinerja Utama Bupati Kapuas Hulu.

x) Sasaran strategis Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat

Pada sasaran strategis meningkatnya angka harapan hidup masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Angka Harapan Hidup	Tahun	72,88	73,49	73,35	73,69	100,46	73,51	100,24
Rata-Rata Capaian Kinerja						100,46		100,24

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Angka Harapan Hidup pada tahun 2025 sebesar 100,46% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100,24%. Angka Harapan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 sebesar 73,69 tahun dan tahun 2024 sebesar 73,49. Ada kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan adanya keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Dalam rangka meningkatkan angka harapan hidup masyarakat melalui upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target pada RPJMD. Peningkatan Angka Harapan Hidup ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor kesehatan yang menjadi salah satu yang berperan dalam memberikan akses pelayanan kesehatan khususnya di puskesmas-puskesmas di seluruh Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan Puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan, maka harapannya masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah dan terjangkau.



Kondisi wilayah yang sangat luas menjadi kendala tersendiri dalam memberikan akses Kesehatan bagi masyarakat, namun upaya yang solutif akan terus dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang jauh dari ibukota kecamatan dengan membentuk Puskesmas Pembantu.

xi) Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas jalan pada status ruas jalan kabupaten dengan indikator Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	%	69,08	34,25	76	34,77	45,75	79	44,01
Rata-Rata Capaian Kinerja						45,75		44,01

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap pada tahun 2025 sebesar 45,75% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 44,01%. Data realisasi indikator Sasaran Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap sebesar 34,77%, mengalami kenaikan dibanding tahun 2024 sebesar 34,25% namun tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan standar untuk kondisi tipe perkerasan kerikil, sehingga kemantapan jalan juga mengalami sedikit penurunan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur khususnya ruas jalan antara lain dengan mengidentifikasi kondisi ruas jalan dengan melakukan rekonstruksi dan pemeliharaan



secara berkala melalui Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

xii) Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Jalan pada Status Ruas Jalan Desa

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas jalan pada status ruas jalan desa dengan indikator Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	%	30,21	28,62	67	28,89	43,12	69	41,87
Rata-Rata Capaian Kinerja						43,12		41,87

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap pada tahun 2025 sebesar 43,12% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 41,87%.

Data realisasi indikator Sasaran Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap sebesar 28,89%. Hal ini disebabkan karena pada awal tahun 2022 kewenangan penanganan jalan desa beralih ke Bidang Bina Marga Dinas PUPR dan kemudian dilakukan pengukuran kondisi jalan dengan survey kondisi yang dilakukan sesuai dengan Permen PUPR serta mengikuti standar pengukuran untuk Jalan Kabupaten. Untuk survey kondisi jalan tersebut sudah menggunakan SK Status Jalan yang ditetapkan oleh Bupati Nomor 513/BAPPEDA/2021 dengan Panjang total 878,979 Km dan Kemudian diubah kembali dengan SK Status Jalan Nomor 122/PUPR/2024 dengan total panjang



747,154 Km. Perubahan SK Status jalan tersebut sesuai dengan instruksi dari Kementerian PUPR bahwa untuk Ruas Jalan Kabupaten yang dalam kondisi rusak parah dan tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 serta dengan lebar dibawah 3,5 m maka diminta untuk diturunkan statusnya menjadi jalan desa. Terdapat juga beberapa jalan non status dalam kondisi rusak berat yang dinaikkan statusnya menjadi jalan desa. Sehingga dari hasil survey kondisi diperoleh kondisi jalan desa yang cenderung turun drastis tingkat kemantapannya.

xiii) Sasaran Strategis Meningkatnya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten

Pada sasaran strategis meningkatnya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten dengan indikator Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						100		100

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten pada tahun 2025 sebesar 100% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100%

Berdasarkan data realisasi indikator sasaran Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten sebesar 100 % dan target tahun 2025 sebesar



100%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa tahun 2025 tidak terdapat bencana yang menyebabkan kerusakan pada rumah.

xiv) Sasaran Strategis Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani

Pada sasaran strategis meningkatnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani dengan indikator Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten yang Ditangani, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten yang Ditangani	%	63,85	6,06	62,75	0	0	69,05	0
Rata-Rata Capaian Kinerja						0		0

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten yang Ditangani pada tahun 2025 sebesar 0% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 0%

Indeks kepuasan layanan infrastruktur kawasan kumuh perkotaan ditentukan berdasarkan pada 6 (enam) unsur, yaitu: (1) ketersediaan saluran air hujan/drainase/biopori, (2) ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah (MCK), (3) kondisi pelayanan air bersih (PDAM, SPAM, SIPAS), (4) kondisi prasarana dan sarana layanan persampahan (TPS, TPS-3R), (5) kondisi jalan lingkungan, dan (6) ketersediaan ruang terbuka hijau (taman, makam, ruang publik).



Berdasarkan data Kawasan kumuh Kabupaten Kapuas Hulu terdapat luas Kawasan kumuh Kabupaten sebesar 359,46 yang tersebar di beberapa Kawasan desa. Untuk Persentase rata-rata kekumuhan sektoral sesuai dengan SK Bupati sebesar 42,02 dan persentase kontribusi penanganan tahun 2024 sebesar 10,74 % dengan persentase Kawasan kumuh yang tertangani sebesar 6,06 %.

Kontribusi penanganan tahun 2025 tidak mencapai target yang direncanakan tahun 2025 sebesar 62,75%. Hal-hal kendala permasalahan dalam penanganan antara lain dikarenakan keterbatasan Sumber daya. Sebagai rekomendasi terhadap upaya pencapaian target tahun selanjutnya antara lain dengan melakukan koordinasi lebih intens dengan stakeholder dan lintas sector, sehingga terdapat kolaborasi dan bersinergi dalam menangani Kawasan kumuh di Kabupaten Kapuas Hulu

xv) Sasaran Strategis Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten

Pada sasaran strategis meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah kabupaten dengan indikator Rasio Konektivitas Kabupaten, dengan hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Rasio Konektivitas Kabupaten	Angka	69	69,57	75,8	53,80	70,98	80,7	66,67
Rata-Rata Capaian Kinerja						70,98		66,67

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Rasio Konektivitas Kabupaten pada tahun 2025 sebesar 70,98% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 66,67%. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab kita dalam meningkatkan



aksesibilitas dan konektivitas wilayah Kabupaten. Melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu memfasilitasi ketersediaan trayek angkutan jalan dan lintas penyeberangan. Untuk trayek angkutan jalan yang tersedia masih belum terpenuhi secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan, namun untuk Lintas penyeberangan sudah dapat terpenuhi/ terlayani sesuai dengan kebutuhan. Untuk memastikan terselenggaranya fasilitasi layanan trayek, khususnya pada lintas penyeberangan, telah dilakukan kolaborasi dengan beberapa perusahaan swasta yang menjadi mitra dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah Kabupaten. Sebagai rekomendasi kedepan, akan dilakukan Langkah-langkah strategis dalam mengupayakan pemenuhan dan pelayanan trayek angkutan jalan yang belum tersedia.

4. Evaluasi Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029

i) Sasaran Meningkatnya Kondusivitas Wilayah

Pada Sasaran Meningkatnya Kondusivitas wilayah dengan indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum. Hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase konflik sosial yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						100		100

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Kondusivitas wilayah dengan indicator persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani pada tahun 2025 sebesar 100% dibandingkan dengan target



capaian akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 100%. Berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan penegakan disiplin terhadap Peraturan Daerah guna menciptakan kondusivitas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

ii) **Sasaran Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2029)	
				Target	Capaian	%	Target	Target
PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	0,44	0,44	2,10	1,38	65,71	3	46,00
PDRB Sektor industri pengolahan	Persen	2,14	2,14	2,64	2,22	84,09	3,64	60,99
PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	5,79	5,79	3,20	5,10	159,38	3,6	141,67
PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	5,75	5,98	3,11	4,27	137,30	2,24	190,63
Rata-Rata Capaian Kinerja						111,62		109,82

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata pada tahun 2025 sebesar 111,62% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 109,82%. Beberapa sektor penunjang laju pertumbuhan ekonomi terdapat 2 (dua) indikator yang capainnya masih rendah seperti PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,38 dari target 2,10 dengan tingkat capaian 65,71% dan PDRB Sektor industri pengolahan sebesar 2,22 dari target 2,64 dengan Tingkat capaian



84,09%. Sektor **pertanian, perikanan, dan industri pengolahan** merupakan penggerak utama perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu. Namun, kontribusi sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi masih belum optimal karena dominasi kegiatan produksi berbasis bahan mentah dan rendahnya nilai tambah. Adapun kendala permasalahan yang di hadapi, dimana Produktivitas sektor pertanian dan perikanan masih sangat rendah dikarenakan masih menggunakan teknologi sederhana serta masih ketergantungan pada musim sehingga hasil produksi belum maksimal dan tidak stabil. Sementara pada sektor industri pengolahan yang menjadi kendala permasalahan adalah minimnya hilirisasi dimana produk dijual dalam bentuk mentah, karena industri pengolahan lokal masih sangat terbatas sehingga inovasi terhadap produk masih sangat kurang. Strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya sektor pertanian perikanan serta sektor industri pengolahan melalui peningkatan investasi dan akses pembiayaan seperti akses kredit, menjalin kemitraan dengan sektor wisata serta melakukan promosi daerah untuk menarik investor. Arah kebijakan utama yang ingin diwujudkan adalah transformasi dari ekonomi berbasis mentah ke ekonomi berbasis nilai tambah, pengembangan kluster komoditas unggulan daerah dan peningkatan daya saing produk lokal. Dampak yang diharapkan yaitu meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat menjadi mandiri dan Sejahtera.

iii) Sasaran Strategis Menurunnya Angka Kemiskinan

Pada sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan dengan indikator Tingkat kemiskinan, dengan hasil capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2029)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Tingkat Kemiskinan	%	7,4	7,40	7,40	6,86	107,30	6,5	94,46
Rata-Rata Capaian Kinerja						107,30		94,46

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan dengan indikator Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 sebesar 107,30% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 94,46%. Kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu masih dipengaruhi oleh keterbatasan akses ekonomi, rendahnya produktivitas serta kondisi wilayah geografis dimana wilayah-wilayah terpencil masih belum mendapatkan akses infrastruktur. Rendahnya pendapatan masyarakat dan tidak stabilnya pendapatan yang diterima masih menjadi factor utama penyebab kemiskinan. Selain itu juga dikarenakan terbatasnya lapangan pekerjaan, dimana kesempatan kerja formal dan produktif masih minim, terutama bagi usia muda. Beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui 3 (tiga) hal antara lain dengan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan memenuhi layanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan infrastruktur. Beberapa strategi yang cukup memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan adalah pemberian bantuan social dan peningkatan akses infrastruktur khususnya wilayah-wilayah terpencil. Kondisi geografis yang sangat luas, menyebabkan upaya pemenuhan layanan dasar menjadi kurang optimal, hal ini disebabkan karena sumber daya anggaran yang tersedia tidak dapat menjangkau pada wilayah yang terpencil. Namun melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas program baik itu antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten diharapkan mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat miskin.



iv) Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Daerah

Pada Sasaran strategis meningkatnya investasi Daerah dengan indicator Pesentase Peningkatan Investasi Daerah, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2029)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Persen	-35,35	-35,35	8	-1,44	-18	8	-18
Rata-Rata Capaian Kinerja						-18		-18

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya investasi Daerah dengan indicator Pesentase Peningkatan Investasi Daerah pada tahun 2025 sebesar -18% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2029 sebesar -18%. Nilai realisasi investasi Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjumlahan dari nilai investasi berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal asing dan penanaman modal negeri.

Bahwa selama kurun waktu 2021-2024 nilai realisasi investasi berhasil melampaui target yang telah ditetapkan (di atas 100%) dari dokumen Renstra DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu periode 2021-2026. Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2024, maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan. Penurunan realisasi investasi ini dipengaruhi oleh resesi dan inflasi yang dapat menghambat aliran modal. Selain itu kenaikan dan penurunan nilai realisasi investasi di daerah dipengaruhi oleh daya tarik investasi yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) yaitu kondisi perekonomian daerah, tersedianya infrastruktur, tersedianya sumber daya manusia dan kondisi keamanan, politik dan sosial budaya serta manajemen kualitas pelayanan/ kelembagaan yang dapat dikendalikan (*controllable*).



Upaya yang telah dilakukan melalui DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka meningkatkan realisasi investasi yaitu dengan mengoptimalkan peran pengendalian penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan memberikan bimbingan teknis dan pembinaan bagi perusahaan agar dapat melaporkan perkembangan kegiatan penanaman modalnya dengan benar dan tertib dan mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) agar memenuhi komitmen melalui kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan.

v) Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Nilai indeks kualitas lingkungan hidup, dengan hasil pencapaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2029)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Nilai indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	80,15	79,79	83,38	82,82	99,33	83,87	98,95
Rata-Rata Capaian Kinerja						99,33		98,95

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Nilai indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2025 sebesar 99,33% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 98,95%. Berdasarkan data realisasi indikator sasaran nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 sebesar 82,82 dengan kategori Baik. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati adalah 83,38, dengan capaian 99,33%. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan Kualitas Lingkungan Hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal



Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.276/SETPPKL/PEHKT/DTN.02/B/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 Tentang Penyampaian Hasil Terkini Nilai IKLH Tahun 2024, IKLH terdiri dari 3 (tiga) indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 58,89 (sedang), Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 93,85 (Sangat baik) dan Indeks Tutupan Lahan (IKL) dengan bobot 89,67 (baik). Berdasarkan Capaian Kinerja pada IKA, IKU dan IKL tahun 2024 tersebut, diperoleh IKLH Kabupaten tahun 2024 sebesar 79,79 atau kategori Baik. Nilai ini telah memenuhi target pada tahun 2024 bahkan melebihi target tahun 2024 dan juga melebihi target akhir RPJMD tahun 2026.

vi) Sasaran Strategis Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana

Pada sasaran strategis meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dengan indicator Indeks Resiko Bencana, dengan hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2029)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Indeks Risiko Bencana	Indeks	135,17	135,17	128,21	137,63	92,65	123,29	88,37
Rata-Rata Capaian Kinerja						92,65		88,37

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Indeks Resiko Bencana pada tahun 2025 sebesar 92,65% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 88,37%. Indeks Resiko Bencana dilakukan penghitungan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan input data yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaporkan secara periodik. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2025



sebesar 128,21. Dimana semakin tinggi capaian Indeks Resiko Bencana maka semakin tinggi juga resiko bencana yang terjadi di Kapuas Hulu. Jika dilihat dari skor Indeks Risiko Bencana tahun 2024 mengalami kenaikan pada tahun 2025 dikarenakan pemenuhan salah satu indikator IKD yaitu belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kapuas Hulu. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan skor IRBI Kabupaten Kapuas Hulu, melalui sosialisasi dan pendampingan serta pelatihan kepada masyarakat dalam menanggulangi bencana. Sebagai rekomendasi teknis bahwa mengingat Dokumen Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Kapuas Hulu yang diterbitkan oleh BNPB berakhir pada tahun 2021 atau telah kadaluarsa masa berlakunya maka perlu menyusun dan menetapkan Kajian Resiko Bencana guna memenuhi salah satu komponen utama dalam indikator kapasitas penurunan indeks resiko bencana.

vii) Sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pada sasaran strategis meningkatnya angka harapan hidup masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2029)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Angka Harapan Hidup	Tahun	72,88	73,49	73,66	73,69	100,04	74,34	99,13
Rata-Rata Capaian Kinerja						100,04		99,13

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Angka Harapan Hidup pada tahun 2025 sebesar 100,04% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 99,13%. Angka Harapan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu



tahun 2025 sebesar 73,69 tahun dan tahun 2024 sebesar 73,49. Ada kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan adanya keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Dalam rangka meningkatkan angka harapan hidup masyarakat melalui upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target pada RPJMD. Peningkatan Angka Harapan Hidup ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor kesehatan yang menjadi salah satu yang berperan dalam memberikan akses pelayanan kesehatan khususnya di puskesmas-puskesmas di seluruh Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan Puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan, maka harapannya masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah dan terjangkau. Kondisi wilayah yang sangat luas menjadi kendala tersendiri dalam memberikan akses Kesehatan bagi masyarakat, namun upaya yang solutif akan terus dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang jauh dari ibukota kecamatan dengan membentuk Puskesmas Pembantu.

viii) Sasaran Strategis Terjaminnya Ketersediaan Pangan sebagai Kebutuhan Dasar

Pada sasaran strategis Terjaminnya Ketersediaan Pangan Sebagai Kebutuhan dasar dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2029)	
				Target	Capaian	%	Target	Target
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,43	74,43	74,44	68,28	91,72	74,48	91,68
Rata-Rata Capaian Kinerja						91,72		91,68

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Terjaminnya Ketersediaan Pangan sebagai Kebutuhan Dasar pada tahun 2025 sebesar 91,72% dibandingkan dengan



target capaian akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 91,68%. Kapuas Hulu memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan, namun menghadapi tantangan geografis dan distribusi yang memengaruhi stabilitas pangan. Adapun kendala permasalahan yang dihadapi antara lain keterbatasan produksi pangan lokal dimana produktivitas pertanian masih rendah karena ketergantungan pada musim dan masih mengandalkan teknologi sederhana. Selain itu juga aksesibilitas wilayah yang sulit, kerentanan terhadap perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan serta pola tanam yang belum adaptif terhadap perubahan iklim yang pada akhirnya produksi pertanian rendah dan menyebabkan keterbatasan Cadangan pangan dan stabilitas pangan. Strategi upaya yang bisa dilakukan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Penguatan infrastruktur dan distribusi pangan seperti Pembangunan jalan usaha tani dan akses distribusi serta optimalisasi transportasi Sungai untuk mendistribusikan pangan ke daerah yang terpencil. Selain itu juga strategi penguatan Cadangan dan stabilitas harga pangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat serta operasi pasar saat harga melonjak menjadi upaya kongkrit yang cukup relevan terhadap kondisi masyarakat saat ini. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga menetapkan kebijakan strategis melalui Peraturan Daerah tentang Cadangan pangan daerah agar terbangun koordinasi antar stakeholder agar kelembagaan dan kolaborasi menjadi lebih baik.

ix) Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Pada sasaran strategis meningkatnya harapan lama sekolah dan meningkatnya rata-rata lama sekolah dengan indikator Harapan Lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS), hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2029)	
				Target	Capaian	%	Target	Target
Harapan Lama sekolah	Tahun	12,23	12,23	12,25	12,24	99,92	12,33	99,27
Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,8	8,03	8,12	8,04	99,001	8,48	94,81
Indeks Pembangunan Literasi	Skor	58,36	54,87	56,37	21,77	38,62	62,57	34,79
Rata-Rata Capaian Kinerja						79,18		76,29

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan pada tahun 2025 sebesar 79,18% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 76,29%. Capaian Kinerja pada indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tahun 2025 sudah tercapai, namun untuk Indeks Pembangunan Literasi capaiannya masih rendah sebesar 38,62%. Upaya untuk meningkatkan indeks Pembangunan literasi sudah dilakukan, namun melihat kondisi geografis, social, infrastruktur yang masih sangat rendah menjadi tantangan yang cukup berat. Akses terhadap sumber bacaan terbatas, dimana distribusi perpustakaan juga belum merata khususnya di desa terpencil, keterbatasan infrastruktur dan akses digital khususnya daerah pedalaman masih sulit mengakses internet, serta masih rendahnya minat baca masyarakat. Selain itu juga keterbatasan sumberdaya baik sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran serta sarana prasarana juga menjadi kendala permasalahan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

x) Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Pada sasaran strategis meningkatnya pendapatan masyarakat, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2029)	
				Target	Capaian	%	Target	Target
Pengeluaran perkapita	000 Rp/ Kapita/ Thn	8.470	8.470	8.770	8.765	99,94	9.970	87,91
Rata-Rata Capaian Kinerja						99,94		87,91

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikator pengeluaran perkapita pada tahun 2025 sebesar 99,94% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 87,91% dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya Terdapat peningkatan yang cukup baik dimana tahun 2024 sebesar 8.470 dan tahun 2025 sebesar 8.470. Namun tren peningkatan tersebut masih terdapat beberapa kendala permasalahan yang dihadapi antara lain dikarenakan masih kuatnya ketergantungan pada sektor ekonomi tradisional, dimana masyarakat Kapuas hulu masih tergantung dengan pola usaha tradisional dan produktivitas rendah, sehingga pendapatan masyarakat menjadi tidak stabil dan nilai jual produk relative rendah. Selain itu juga dikarenakan terbatasnya akses pasar, rendahnya nilai tambah produk local, terbatasnya lapangan kerja dan terbatasnya akses permodalan usaha. Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pengembangan sektor unggulan daerah yang memiliki potensi besar seperti pertanian, Perkebunan dan perikanan. Selain itu juga dilakukan penguatan UMKM dan kewirausahaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan usaha dan inkubasi bisnis UMKM. Pemerintah daerah juga melakukan sinergi Pembangunan dengan pemerintah pusat untuk peningkatan infrastruktur ekonomi dan konektivitas guna memperluas akses pasar masyarakat melalui Pembangunan jalan penghubung desa, dan penguatan jaringan distribusi produk



agar biaya distribusi dapat ditekan dan daya saing produk meningkat. Dengan Implementasi strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat dan berkembangnya usaha ekonomi masyarakat sehingga mampu mendorong peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

xi) Sasaran Strategis Meningkatnya Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada sasaran strategis meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2029)	
				Target	Capaian	%	Target	Target
Indeks pemberdayaan gender	indeks	63,76	63,76	64,16	86,83	135,33	64,76	134,08
Rata-Rata Capaian Kinerja						135,33		134,08

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator pemberdayaan gender pada tahun 2025 sebesar 135,33% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 134,08%. Terdapat peningkatan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tahun 2024 sebesar 63,76 dan tahun 2025 sebesar 86,83. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi optimalisasi kesetaraan gender dan perlindungan anak, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun kelembagaan seperti masih terbatasnya peran Perempuan dalam pengambilan Keputusan, masih ditemui kasus kekerasan terhadap perlindungan anak dan Implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut menunjukkan



perlunya strategi yang lebih terarah untuk meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak di daerah. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Kabupaten Kapuas Hulu memerlukan upaya yang terintegrasi melalui penguatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan pelaksanaan strategi tersebut secara konsisten dan dukungan kebijakan yang kuat dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan, pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dapat terwujud.

xii) Sasaran strategis Meningkatnya Kesempatan Kerja yang berkualitas di Kapuas Hulu

Pada sasaran strategis meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas di Kapuas Hulu dengan indikator Tingkat partisipasi angkatan kerja, dengan hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2029)	
				Target	Capaian	%	Target	%
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	72,28	76,02	73,28	74,19	101,24	75,28	98,55
Rata-Rata Capaian Kinerja						101,24		98,55

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2025 sebesar 101,24 % dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 98,55 %. Data tenaga kerja yang terdaftar dalam layanan AK-1 pada tahun 2025 sebanyak 11.791 orang. Sementara yang mendapatkan fasilitasi untuk pelatihan sebanyak 535 orang,



sehingga hanya 2,85% tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikat. Kondisi ini tentu masih sangat jauh dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena beberapa factor antara lain kualitas sumber daya manusia masih sangat terbatas dimana Tingkat Pendidikan dan ketrampilan masih sangat rendah sehingga sulit untuk bersaing. Faktor lain adalah terbatasnya diversifikasi lapangan kerja, minimnya investasi dan pengembangan industry, insfrastruktur ekonomi yang belum optimal dan terbatasnya akses pengembangan kewirausahaan. Sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan kesempatan kerja berkualitas antara lain dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja dengan kemitraan antara pemerintah daerah dengan Lembaga Pendidikan, Pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah, peningkatan investasi daerah dan peningkatan infrastruktur ekonomi. Dengan strategi yang terintegrasi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kesempatan kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan dapat tercipta sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada daerah/kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak mendapatkan Tugas Pembantuan baik itu dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Begitu juga dengan DAK Fisik dan Non Fisik pada tahun 2025 tidak diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar yang harus diberikan Pemerintah Kabupaten pada bidang pendidikan terdiri atas :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.1

Target dan Indikator SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	persentase jumlah anak Usia 5 sampai 6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	100 %
2.	Pendidikan Dasar	persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	100 %



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
3.	Pendidikan Kesetaraan	persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan;	100

4.1.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Capaian SPM Bidang Pendidikan

Jenis Layanan SPM	Jumlah total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian
Pendidikan Anak Usia Dini	5550	5550	0	100%
Pendidikan Dasar	39.200	39.200	0	100%
Pendidikan Kesetaraan	750	750	0	100%

Dari tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Pada tahun 2025 Capaian Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebesar 100 % sesuai target yang ditetapkan.
- Pada tahun 2025 Capaian Pelayanan Pendidikan Dasar adalah sebesar 100 % sesuai target yang ditetapkan.
- Pada tahun 2025 Capaian Pelayanan Pendidikan Kesetaraan adalah sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang pendidikan sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Untuk mendukung upaya pemenuhan SPM, pada Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan



Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu dengan rincian alokasi dan realisasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Anggaran SPM Bidang Pendidikan

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. KAPUAS HULU	1.812.061.985.759
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	509.369.067.240
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	95.446.583.610
	APBD	95.446.583.610
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	33.052.576.610
	C. APBD DAK FISIK	751.572.000
	D. APBD DAK NON FISIK	61.642.435.000
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

4.1.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur baik PNS maupun tenaga kontrak sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Data Personil SPM Bidang Pendidikan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	GURU	
	a. PAUD	495 orang
	b. TK	179 orang



NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	
	b. SD	3.295	orang
	c. SMP	1.282	orang
2	KESETARAAN	56	orang
3	PENGAWAS	34	orang
4	PENILIK		orang
5	TENAGA KEPENDIDIKAN/PENUNJANG	664	orang
6	PEJABAT STRUKTURAL	9	orang
7	FUNGSIONAL UMUM/PELAKSANA	94	orang
8	JABATAN FUNGSIONAL	19	orang
JUMLAH		6.127	orang

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Secara geografis wilayah Kabupaten Kapuas Hulu cukup luas dengan jangkauan 23 Kecamatan.
- Secara akses infrastruktur jalan masih minim dan masih ada wilayah yang belum terakses oleh jalan yang baik.
- Sumber dana pembangunan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kemampuan keuangan bersumber dari APBD belum dapat secara optimal / terbatas
- Sumber daya aparatur terbatas.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- Meningkatkan sumber daya dana dan SDM.
- Meningkatkan sarana infrastruktur.
- Program berkelanjutan dalam peningkatan mutu pendidikan.
- Sistem rekrutmen pegawai khususnya guru/pendidik minimal pendidikan S-1/ D-4.
- Penguatan sistem pengendalian, pengawasan di satuan pendidikan melalui petugas pengawas / penilik.



4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Pelayanan Standar Minimal Kesehatan disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar yang harus diberikan Pemerintah Kabupaten pada bidang kesehatan terdiri atas :

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil,
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin,
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir,
- d. pelayanan kesehatan balita,
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar,
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif,
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut,
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi,
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus,
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat,
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Target dan Indikator SPM Kesehatan



NO	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase penduduk usia 15 s.d. 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Persentase penderita TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	100%
2	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, waria/ transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	100%

4.2.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang



dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.6.
Capaian SPM Bidang Kesehatan

Jenis Layanan SPM	Jumlah total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian
Pelayanan Ibu Hamil	3416	3416	0	100 %
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2885	2885	0	100 %
Pelayanan Kesehatan Bayi Lahir	2875	2875	0	100%
Pelayanan Kesehatan Balita	12.723	12.723	0	100%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	41.788	41.788	0	100%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	167.760	162.763	4.997	97.02%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	21.135	20.422	713	96.63%
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	53.578	52.518	1060	98.02%
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.188	3.188	0	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	583	583	0	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.670	3.670	0	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	5.932	5.932	0	100%

4.2.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Kesehatan sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2024 Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi



anggaran pada masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.7.
Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan
SPM Bidang Kesehatan

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. KAPUAS HULU	1.812.061.985.759
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	5.532.911.000
	APBD	5.532.911.000
	A. APBD MURNI	1.168.335.000
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	4.364.576.000
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

4.2.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan menurut jabatan sebagaimana tabel berikut :



Tabel 4.8.
Data Personil SPM Bidang Kesehatan

NO.	JENIS TENAGA	PNS	KONTRAK	NS	MAGANG	PPPK	JUMLAH
1	DOKTER UMUM	25	15	6	1	6	53
2	DOKTER GIGI	5	2	4		1	12
3	DOKTER SPESIALIS	6	6				12
4	PERAWAT	277	100		104	371	852
5	PERAWAT GIGI	27	4		5	7	43
6	BIDAN	217	55		65	218	555
7	ANALIS	30	6	3	10	14	63
8	FARMASI	25	1		7	15	48
9	APOTEKER	18		3	1	13	35
10	KESLING	19	1	6	1	8	35
11	SKM	25	19		15	19	59
12	FISIOTERAPI	2				2	4
13	ELEKTROMEDIK	1	1				2
14	RADIOGRAFER	4	1			3	8
15	GIZI	34	1		16	10	61
16	REKAM MEDIK	1	6		8	12	27
17	TENAGA PENUNJANG	118	187		25	12	342
JUMLAH		834	405	22	258	711	2230

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kesenjangan antara data proyeksi dan data riil yang besar.
2. Regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu dinilai masih sangat lemah dan perlu dibenahi serta ditingkatkan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.
3. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai.



4. Pencatatan dan laporan yang belum tertib.
5. Perekrutan SDM belum menyesuaikan kebutuhan terkait Kompetensi Peningkatan SPM.
6. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan masih ada yang belum memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan.
7. Evaluasi SPM belum terintegrasi secara optimal.
8. Sarana dan prasarana kesehatan rujukan yang belum paripurna. dan Sarana dan prasarana kesehatan dasar yang belum merata.
9. Sosialisasi Informasi Program dan Hasil Kegiatan yang belum maksimal.
10. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah.
11. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain (new emerging dan re- emerging).
12. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih tidak optimal di masyarakat.
13. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dan letak geografis yang sulit dijangkau.
16. Masyarakat yang takut mendatangi atau mengunjungi Fasilitas kesehatan sehingga terjadi keterlambatan penanganan komplikasi pada ibu maupun bayi.
17. Penjangkaran dan pelayanan kesehatan tidak bias dilaksanakan secara optimal.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- a. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*);
- b. Peningkatan dan Pemerataan SDM, diutamakan untuk ketersediaan 6 jenis tenaga kesehatan yaitu: tenaga dokter,



tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan.

- c. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas; Kemampuan manajemen Puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu sistem informasi kesehatan, mutu perencanaan di tingkat Puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan kualitas kesehatan masyarakat, dan Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas.
- d. Efisiensi pembiayaan, Pembiayaan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan promotif dan preventif secara efektif dan efisien.
- e. Pengembangan sistem informasi kesehatan, diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi masalah kesehatan dan capaian pembangunan kesehatan yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat.
- f. Penguatan pelayanan kesehatan sekunder (rujukan).
- g. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (*Continuum of Care*), melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.
- h. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan, melalui program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil.
- i. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kualitas promosi kesehatan secara berkelanjutan untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa kesehatan memerlukan peran serta dan pemberdayaan di masyarakat.
- j. Peningkatan Inovasi dalam pelayanan.
- k. Penjaringan dan pelayanan di masa pandemi berpedoman pada protokol kesehatan serta petunjuk teknis yang berlaku.



4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar yang harus diberikan Pemerintah Kabupaten pada bidang Pekerjaan umum terdiri atas :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.11.
Target dan Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten/Kota	100 %
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air limbah domestik terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100 %

4.3.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.12.
Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Jenis Layanan SPM	Jumlah total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	4008	4008	0	100%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	825	825	0	100%

4.3.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Pekerjaan Umum sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.13
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. KAPUAS HULU	1.12.061.985.759
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	235.584.610.320
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	15.716.901.000
	APBD	15.716.901.000
	A. APBD MURNI	
	B. APBD DAU	2.164.460.000



NO	PENDANAAN	PAGU
	C. APBD DAK FISIK	13.074.784.450
	D. APBD DAK NON FISIK	477.656.550
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

4.3.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan menurut nama jabatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.14

Data Personil SPM Pekerjaan Umum

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
3.	Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Jalan Lingkungan	1
4.	Kepala Bidang Bina Marga	1
5.	Kepala Bidang Tata Ruang	1
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	1
7.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan	1
8.	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	1
9.	Kepala Subbagian Program	1
10.	Kepala Subbagian Umum dan Aparatur	1
10.	Kepala UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase Wilayah I	2
9.	Kepala UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya	1
10.	Jabatan Fungsional Tertentu	22
11.	Jabatan Fungsional Umum	32
JUMLAH		67



4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat yang menggunakan perpipaan serta Kurangnya respon masyarakat untuk memelihara Sarana Air bersih yang ada bahkan Sering diabaikan pentingnya peran kebersihan
- b. Masih ada masyarakat yang menolak pembangunan Sanitasi (IPAL) karena ketidaktahuan fungsinya bahkan Adanya keberatan atas pembangunan yang harus melewati tanah masyarakat.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- a. Adanya pembinaan dan sosialisasi dari Dinas terkait pemeliharaan saran dan prasarana air bersih.
- b. Adanya pembinaan dan sosialisasi dari terkait pemeliharaan saran dan prasarana sanitasi.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan bahwa SPM bidang perumahan rakyat terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan



- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena rekolasi program.

4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang perumahan rakyat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.15.
Target dan Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di wilayah kerja kabupaten/kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase masyarakat yang terkena relokasi yang mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%

4.4.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :



Tabel 4.16.
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Jenis Layanan SPM	Jumlah total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaen	0	0	0	100%
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	0	0	0	100%

Capaian Kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota adalah sebesar 100 %.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Perumahan Rakyat sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.17.
Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan
SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. KAPUAS HULU	1.812.061.985.759
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	11.467.069.276
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	42.416.800



NO	PENDANAAN	PAGU
	APBD	42.416.800
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	

4.4.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan menurut jabatan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.18.

Data Personil SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1
2.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1
3.	Jabatan Fungsional Tertentu	3
4.	Pelaksana	13
JUMLAH		18



4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Perumahan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensinya;
- b. Capaian SPM Bidang Perumahan belum dapat memenuhi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena kemampuan anggaran yang terbatas dibandingkan dengan pemenuhan capaian SPMnya, disamping itu di Kabupaten Kapuas Hulu tidak terdapat kegiatan pembangunan dengan konsekuensi relokasi warga, mengingat lahan yang masih cukup luas untuk kegiatan pembangunan.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- a. Perlu adanya dukungan anggaran yang berasal dari APBD khususnya APBN;
- b. Perlunya bimbingan teknis (BIMTEK) untuk dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota;

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;



- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 tentang Standar Pelayanan Minimal SubUrusan Bencana Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menyebutkan bahwa SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas:

- e. Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat,
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana,
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- d. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta
- e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.19.
Target dan Indikator SPM
Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target
1.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%



3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

4.5.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.20.

Capaian Kinerja SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Layanan SPM	Jumlah total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	149	149	0	100%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1390	1390	0	100%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1390	1390	0	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0	0	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	0	100%



Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Capaian layanan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat adalah sebesar 100%

Untuk capaian pada urusan kebencanaan semusa tercapai 100 % yaitu pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada tahun 2025

4.5.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.21.

Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. KAPUAS HULU	1.812.061.985.759
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	10.818.902.644
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	706.855.900
	APBD	706.855.900
	A. APBD MURNI	706.855.900
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0



NO	PENDANAAN	PAGU
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

4.5.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan dalam jabatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.22.

Data Personil SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	1
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan	1
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	1
5.	Kepala Bidang Penegakan Operasi	1
6.	Kepala Seksi Pengendalian Operasi	1
7.	Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan	1
8.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	1
9.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1
10.	Jabatan Fungsional	25
11.	Jabatan Pelaksana	12
12.	Tenaga Kontrak Pol PP	52
12.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
13.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
14.	Kepala Sub Bag. Umum dan Aparatur	1
15.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1
16.	Jabatan Fungsional Umum	11
17.	Jabatan fungsional tertentu	34
18.	Tenaga kontrak BPBD	15



NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
	JUMLAH	162

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Belum adanya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Terbatasnya anggaran kegiatan operasional maupun pelaksanaan penindakan pelanggaran PERDA.
- Peraturan Daerah yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/ instansi terkait.
- Jauhnya jarak tempuh daerah rawan bencana dari posko komando bencana.
- Terbatasnya anggaran operasional penanggulangan bencana.
- Terbatasnya sarana dan prasarana penyelamatan korban bencana.
- Kurangnya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga menyulitkan pengendalian kebakaran di lokasi di luar WMK.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :



- a. Memberikan kesempatan kepada PNS Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan PPNS guna mengoptimalkan penindakan, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran PERDA.
- b. Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional.
- c. Melakukan revisi atas produk peraturan daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- d. Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.
- e. Meningkatkan fungsi dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi bencana sebelum petugas gabungan hadir dilokasi kejadian.
- f. Memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) untuk mengenal potensi kebakaran dan memberikan pengetahuan tentang tata cara pengendalian dini musibah kebakaran.

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa SPM bidang Sosial terdiri atas :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota,



- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota,
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota, serta
- d. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang sosial, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.23.

Target dan Indikator SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4	Rehabilitasi sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah gelandang dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap	100%



4.6.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.24.

Capaian SPM Bidang Sosial

Jenis Layanan SPM	Jumlah total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	248	248	0	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	37	37	0	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	36	36	0	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna social Khususnya Gelandangan dan pengemis di Luar Panti	0	0	0	100%
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat Bagi Korban Bencana Kabupaten	30	30	0	100%

Berdasarkan dari tabel diatas, bahwa pelayanan dasar di bidang urusan sosial mencapai 100%.

4.6.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Sosial sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi



untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.25

Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan SPM Bidang Sosial

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. KAPUAS HULU	1,812.061.985.759
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	3.964.753.000
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	487.012.700
	APBD	487.012.700
	A. APBD MURNI	487.012.700
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

4.6.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan berdasarkan jabatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.26.

Data Personil SPM Bidang Sosial

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1
2.	Kepala Bidang Sosial	1



3.	Fungsional tertentu	2
4.	Fungsional Umum	5
JUMLAH		9

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Sosial, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani.
2. Tidak ada Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan gepeng di Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS.
2. meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS, TSKK, PKH dan Organisasi Sosial Lainnya untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.
4. Memberikan pelayanan rehabilitasi Sosial kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas yang miskin dan kurang mampu Di luar panti.



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu adalah Laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 merupakan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memuat capaian Indikator Hasil (Outcome) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang meliputi :

1. pelaksanaan urusan konkuren di Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, administrasi kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan dan perpustakaan.
2. pelaksanaan urusan pilihan di Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari urusan perikanan, pertanian, pariwisata, perindustrian, perdagangan, transmigrasi



3. pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari unsur penunjang perencanaan, keuangan, kelembagaan, kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan penembangan, pengawasan, pengadaan barang dan jasa, hubungan dengan perwakilan daerah, serta pelayanan publik.

Selain memuat capaian kinerja urusan pemerintahan sebagaimana disampaikan diatas, LPPD Kabupaten Kapuas Hulu juga memuat Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang menggambarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama pada masing-masing sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 serta Laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi SPM 6 (enam) bidang yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Sosial serta Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pada hakekatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025 dapat dikatakan berjalan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut juga tentunya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha yang tidak dapat dilepaskan dari itikad baik, kerja keras, kreativitas dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan urusannya masing-masing, khususnya Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Politik, Lembaga Profesi, Tokoh-tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama dan seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu lainnya.

Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan berdasarkan Indikator Kinerja Hasil (Outcome) sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang telah dicapai pada tahun



2025 tentunya masih perlu untuk ditingkatkan pada tahun-tahun sebelumnya mengingat masih terdapat kinerja yang belum memenuhi harapan yang disebabkan oleh berbagai macam kendala dan keterbatasan.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan capaian kinerja tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Tahun 2025-2029. Capaian kinerja IKU pada tahun 2025 akan menjadi umpan balik dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga RPJMD yang akan disusun nantinya dapat menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan pada akhirnya akan dapat menunjang peningkatan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Capaian kinerja yang masih rendah pada Indikator Kinerja Hasil (Outcome) dan Indikator Kinerja Utama yang disebabkan karena masih terdapat kekurangan, kelemahan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2024. Terhadap hal tersebut akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Diharapkan pada proses evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun-tahun mendatang untuk mewujudkan Kapuas Hulu yang Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya saing, Semakin Amanah dan Terampil (HEBAT).



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
1	Pendidikan	1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100$	6.073	X100 %	69,255%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				8.769			
		2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan dasar}}{\text{jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100$	41.151	X100 %	93,195%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				44.156			
		3 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100$	330	X100 %	6,695%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				4.929			
		4 Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah toilet sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dalam kondisi baik}}{\text{jumlah seluruh toilet}} \times 100$	839	X100 %	56,460%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1.486			
		5 Persentase Ruang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah pertama dalam kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah ruang kelas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah Seluruh Ruang kelas}} \times 100$	1.829	X100 %	62,423%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2.930			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
2	Kesehatan	1 Persentase Kematian Ibu	Jumlah Kematian Ibu Tahun 2025	3	X100 %	0,091%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			Jumlah Ibu Melahirkan Tahun 2025 x 100	3.311			
		2 Prevalensi Stunting	Jumlah Balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	4.166	X100 %	27,967%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			Jumlah Balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu x 100	14.896			
		3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan prenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun(nominator) x 100	2.293	X100 %	79,480%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama	2.885			
		4 Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun x 100	3.149	X100 %	100,000%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			Jumlah sasaran Ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.149			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
		5 Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun $\times 100$	3.259 $\times 100 \%$	95,404%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
			jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.416			
		6 Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 $\times 100$	12.723 $\times 100 \%$	85,613%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
			jumlah balita usia 12-259 bulan di wilayah kerja kabupaten tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	14.861			
		7 Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun ajaran $\times 100$	41.788 $\times 100 \%$	100,000%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
			Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	41.788			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
		8 Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabuapten yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun			97,015%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			$\frac{\text{jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah orang usia 15-59 tahun di kabuapten yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100$	162.753	X100 %		
		9 Persentase Warga Negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah semua warga negara usia 60 tahun atau lebih yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)			96,626%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			$\frac{\text{jumlah warga negara usai 60 tahun atau lebih yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua warga negara usia 60 tahun atau lebih yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100$	20.422	X100 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
		10 Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	$\frac{\text{jumlah penderita hipertensi usia >15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah estimasi penderita hipertensi usia > 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevelensi kabuapten dalam kurun waktu satu tahun yag sama}} \times 100$	$\frac{52.518}{52.518} \times 100 \%$	100,000%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		11 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita DM sesuai standar	$\frac{\text{jumlah penderita DM usia .15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah estimasi penderita DM usia > 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten berdasarkan angka prevelensi kabuapten dalam kurun waktu satu tahun yag sama}} \times 100$	$\frac{3.188}{3.188} \times 100 \%$	100,000%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
		12 persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun x 100	583	X100 %	100,000%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			jumlah penderita ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun	583			
		13 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun x 100	3.670	X100 %	100,000%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			Jumlah perkiraan orang yang terduga tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.670			
		14 Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) sesuai standar	jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun WBP, dan Transgender/Waria) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun x 100	5.932	X100 %	100,000%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun WBP, dan Transgender/Waria) dalam kurun waktu satu tahun	5.932			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
3	Pekerjaan Umum	1 Persentase Kondisi Irigasi Kewenagnan Kabupaten	Luas Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	638	X100 %	8,553%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten (Ha)	7.457			
		2 Persentase Kemantapan jalan Kabupaten	Jumlah Panjang kewenangan kabupaten (km) (panjang jalan kondisi baik+panjang jalan kondisi sedang)	432,81	X100 %	34,770%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Panjang jalan kewenangan Kabupaten	1244,78			
		3 Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten pada tahun 2025	166.809	X100 %	59,533%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Jumlah total penduduk kabupaten	280198,00			
		4 Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Jumlah Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah IPALD	50.086	X100 %	79,084%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			jumlah rumah di Kabupaten	63333,00			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
		5 Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	$\frac{\text{Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (Ha)}}{\text{Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)}}$	0,00	X100 %	0,000%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				0,00			
		6 Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang pantai Kewenangan Kabupaten	$\frac{\text{Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur engaman pantai keweangan kabupaten (ha)}}{\text{Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenaangan kabupaten (ha)}}$	0,00	X100 %	0,000%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				0,00			
		7 Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang digunakan sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku}} \times 100$	9	X100 %	100,000%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				9			
		8 Persentase Persetujuan Bangunan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	$\frac{\text{Jumlah Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat}}$	0,00	X100 %	0,000%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				0,00			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
		9 Rasio tenaga Operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemerintah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan tekni/analisis $\times 100$	20,00	X100 %	3,976%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten	503,00			
		10 Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang sudah diterbitkan kabupaten	Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun $\times 100$	58,00	X100 %	100,000%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	58,00			
4	Perumahan Rakyat	1 Persentase Warga negara Korban Bencana Kabupaten Yang Memperole Rumah LayakHuni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun 2025 $\times 100$	0,00	X100 %	0,000%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
			Jumlah total rencan warga negara korban bencana kabupaten yang akan ditangani pada tahun 2025	0,00			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
		2 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	0,00	X100 %	0,000%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
			Target luas kawasan kumuh di bawah 10 ha pada tahun 2025	0,00			
		3 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani pada tahun 2025	425,00	X100 %	3,856%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
			Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2025	11021,00			
		4 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarna, Sarana dan utilitas Umum di tahun 2025	0,00	x 100%	0,000%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
			Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarna, Sarana dan Utilitas umum di tahun 2025	0,00			
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Persentase Dokumen Kebencanaan Yang telah ditetapkan dan Masih berlaku	Jumlah dokumen kebenaran yang telah ditetapkan da masih berlaku pada tanun N	0	x 100%	0,000%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah dokumen kebencanaan KRB, RPB dan Rekon=3	3			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
		2 Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan polisi Pamong Praja	Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum Yang ditangani			Satpol PP	
				35	x 100%		
		3 Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum Yang Dilaporkan	35		Satpol PP	
			jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan x 100	6	x 100%		
		4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana x 100	950	x 100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana	280.198			
		5 jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana x 100	72.934	x 100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	72.934			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
		6 persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{\text{jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{jumlah kejadian kebakaran di kabupaten}} \times 100 \%$	$\frac{9}{19} \times 100\%$	47,368%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
6	Sosial	1 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	$\frac{\text{jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{populasi penyandang disabilitas terlantar di Kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar diluar panti sesuai hasil asesmen}} \times 100$	$\frac{256}{1.778} \times 100 \%$	14,398%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tidak terdapat penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis yang terlantar
		2 Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	$\frac{\text{Jumlah Anak Terlantar diuar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{populasi anak terlantar di daerah kebuapten yang membuthkan rehabilitasi sosial dasar diuar panti sesuai hasil asesman}} \times 100$	$\frac{22}{24} \times 100 \%$	91,667%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		3 Persentase Anak Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	$\frac{\text{Jumlah Lanjut Usia Terlantar diuar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil aseeman}} \times 100$	$\frac{36}{5.026} \times 100 \%$	0,716%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
		4 Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-	X100 %	0,000%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Populasi Gelandangan dan Pengemis di daerah kabuapten yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen	-			
		5 Persentase korban bencana alam, Sosial dan/atau Non Alam Yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saatdan setelah tanggap darurat bencana kabupaten	Jumlah korban benana alam,sosial dan non alam kbaupten yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	135	X100 %	0,184%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tangga darurat bencana kabupaten	73.180			
		6 Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Jumlah Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	314	X100 %	6,386%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			populasi masyarakt miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten	4.917			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
7	Tenaga Kerja	1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	7	X100 %	100,000%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
			jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten x 100	7			
		2 Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	jumlah perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak	31	X100 %	62,000%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
			jumlah perusahaan x 100	50			
		3 Persentase Pekerja bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan sosial Ketenagakerjaan	Jumlah Pekerja bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan sosial Ketenagakerjaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten	2.405	X100 %	100,000%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
			Jumlah Target Pekerja bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan sosial Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah	2.405			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	2	X100 %	50,000%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun) x 100	4			
		2 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang mendapatkan layanan komprehensif	jumlah perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan layanan komprehensif x 100	3	X100 %	30,000%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang	10			
9	Pangan	1 Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten	jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten x 100	0	X100 %	0,000%	Dinas Pertanian dan Pangan
			Target Jumlah cadangan Pangan	41			
10	Pertanahan	1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan pemerintah x 100	3.196.621,00	X100 %	12,145%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
			Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset pemerintah daerah	26.320.082,88			
		2 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada kondisi eksisting x 100	0	X100 %	0,000%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
			Luas rencana pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	1			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
		3 Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	0	X100 %	0,000%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
			Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamankan dalam rencana tata ruang x 100	1			
11	Lingkungan Hidup	1 Persentase Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	Jumlah Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten x 100	81	X100 %	100,000%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
			Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	81			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani	Jumlah Sampah yang diangkut, pemilahan dan pengaolahan sampah di instalsi pengolahan sampah Tempat Pengolahan Samah Reduce, Reuse,Recyle, Pusat Daur Ulang, Tempa Pengaolahan Sampah Terpadu, Stasiun Peralihan Antara, Pembangkit Listrik Energi Sampah/Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Refuse Derived Fuel, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai denan peraturan perundangan dan pemrosesan akhir/tempat pengolahan sampah terpadu kabupaten atau Tempat Pemrosesan Akhir/Temoat Pengolahan Sampah Terpadu Regional di wilayah Kabupaten $\frac{\text{Jumlah Sampah yang diangkut, pemilahan dan pengaolahan sampah di instalsi pengolahan sampah Tempat Pengolahan Samah Reduce, Reuse,Recyle, Pusat Daur Ulang, Tempa Pengaolahan Sampah Terpadu, Stasiun Peralihan Antara, Pembangkit Listrik Energi Sampah/Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Refuse Derived Fuel, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai denan peraturan perundangan dan pemrosesan akhir/tempat pengolahan sampah terpadu kabupaten atau Tempat Pemrosesan Akhir/Temoat Pengolahan Sampah Terpadu Regional di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah seluruh timbunan sampah di wilayah kabupaten}} \times 100$	9.890	x 100	7,06%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
			Jumlah seluruh timbunan sampah di wilayah kabupaten	140.099			
		1 Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan	Akta Kelahiran yang diterbitkan $\frac{\text{Akta Kelahiran yang diterbitkan}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times 100$	79.964	X100 %	99,671%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2 Persentase Kepemilikan Kartu identitas Anak	Jumlah anak yang memiliki KIA $\frac{\text{Jumlah anak yang memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak wajib KIA}} \times 100$	73.657	X100 %	97,787%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
		3 Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	jumlah data kependudukan yang disusun dan dipublikasikan x 100	2 X100 %	100,000%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			2 (dua) dokumen	2			
		4 Persentase Kepemilikan Kartu Tnda Penduduk (KTP) Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik x 100	201.055 X100 %	98,129%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Jumlah penduduk 17 tahun keatas	204888			
		5 Persentase Akta Kematian yang diterbitkan Bagi yang melaporkan	Akta Kematian yang diterbitkan x 100	12.298 X100 %	100,000%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	12.298			
		6 Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan Bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan x 100	87.224 X100 %	100,000%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	87.224			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7 Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{\text{Akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan}} \times 100$	$\frac{1.310}{1.310} \times 100 \%$	100,000%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		1 Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	$\frac{\text{jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa membangun}}{\text{Jumlah desa tertinggal awal tahun -n}} \times 100$	$\frac{278}{278} \times 100 \%$	100,000%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri pertahun berdasarkan indeks desa membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)}} \times 100$	$\frac{24}{61} \times 100$	39,34%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		3 Fasilitasi Kerja Sama Desa	$\frac{\text{Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku}}{\text{Jumlah kerja sama desa yang ditangani}} \times 100$	$\frac{4}{4} \times 100$	100,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 TFR (angka kelahiran total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran menurut kelompok umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i = 1 untuk kelompok umur 15-19, i = 2 untuk kelompok umur 20-24, i=7 untuk kelompok umur 45-49 K = Bilangan Konstanta biasanya 1000		2,27	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2 Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern contraceptive Rate/mCPR)	$\frac{\text{jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{jumlah pasangan usia subur}} \times 100$	30.929 45.087 X 100	68,60%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
		3 Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani}}{\text{jumlah pasangan usia subur}} \times 100$	$\frac{2.733}{45.087} \times 100$	6,06%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
15	Perhubungan	1 Konektivitas Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pd kab. tsb) IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas penye-berangan yg beroperasi pd kabupaten tsb x bobot lintas) dibagi jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tsb)		0,78 0,690 1,000	Dinas Perhubungan	
		2 Kinerja lalu lintas kabupaten	V/C Ratio Jalan Kabupaten		0,29	Dinas Perhubungan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
16	Komunikasi dan Informatika	3 Persentase Perusahaan Angkutan umum yang Tersertifikasi Sistem manajemen Keselamatan	Jumlah Perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan $\times 100 \%$	1	X 100	16,67%	Dinas Perhubungan
			Jumlah perusahaan angkutan umum terdata	6			
		1 persentase perangkat daerah yg terhubung dgn akses internet yg disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat daerah dan atau unit pelaksana daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo $\times 100$	1	X 100	2,00%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
			Jumlah Perangkat Daerah dan atau unit pelaksana teknis daerah	50			
		2 persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi $\times 100$	2	X 100	14,29%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
			Jumlah layanan Publik	14			
		3 persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten $\times 100$	193.354,00	X 100	100,00%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
			jumlah penduduk	193.354,00			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Mengukur Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	$\frac{\sum \text{volume usaha koperasi tahun berjalan} - \sum \text{volume usaha koperasi tahun sebelumnya}}{\sum \text{volume usaha koperasi tahun sebelumnya}} \times 100$	$\frac{132.939.228.659 - 115.692.694.598}{115.692.694.598} \times 100 \%$	14,91%	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2 Persentase Usaha Kecil Yang bertransformasi dari informal ke formal	$\frac{\sum \text{Usaha kecil yang memperoleh Nomor induk Berusaha (NIB)}}{\sum \text{Usaha kecil dan menengah}} \times 100$	$\frac{5.111}{11.628} \times 100 \%$	43,95%	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
18	Penanaman Modal	1 persentase peningkatan investasi di Kabupaten	$\frac{(\text{jumlah investasi tahun 2025} - \text{jumlah investasi tahun 2024}) \text{ di kabupaten}}{\text{jumlah investasi tahun 2024 di kabupaten}} \times 100$	$\frac{(894.787.449.526 - 907.844.705.674)}{907.844.705.674}$	-1,44%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
19	Kepemudaan dan Olah Raga	2 Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	$\frac{\text{Total realisasi investasi kabupaten}}{\text{Target investasi provinsi yang ditetapkan oleh BKPM kepada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100$	$\frac{894.787.449.526}{654.810.000.000} \times 100 \%$	136,648%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1 tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten}}{\text{Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten}} \times 100$	$\frac{371}{371} \times 100$	100,00%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
		2 Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten $\times 100$	654 $\times 100$	0,90%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
			jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten	72.521			
		3 Persentase Atlet yang berasal dari kabupaten yang masuk pemusatan latihan daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang dikabupaten yang masuk pemusatan latihan daerah provinsi $\times 100$	2 $\times 100$	12,50%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
			Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten (KONI, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	16			
		4 Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah atlet peraih medali $\times 100$	3 $\times 100$	100,00%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
			Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	3			
20	Statistik	1 Persentase Kepatuhan Daftar Data yang dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah	Jumlah daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah $\times 100$	4.915 $\times 100$	100,00%		
			Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	4.915			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
21	Persandian	1 Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi}}{\text{Nilai optimal indeks keamanan informasi (918)}} \times 100$	68	7,41%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
22	Kebudayaan	1 Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang terlindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan}}{\text{Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan}} \times 100$	13	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	Perpustakaan	2 Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah	$\frac{\text{Jumlah Kunjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun 2025 - Jumlah Kunjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun 2024}}{\text{Jumlah Kunjungan ke Pusat Peninggalan}} \times 100$	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah Kunjungan ke Pusat Peninggalan	-			
		1 nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	TKM= (0,15 x Pra Membaca) + (0,50 x Saat Membaca) + (0,35 x Pasca Membaca) x 100%		60,55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2 indeks pembangunan literasi masyarakat	IPM : (0,30 x Dimensi Kepatuhan) + (0,70 x Dimensi Kerja) x 100		21,77	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
24	Kearsipan	1 tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)	$T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		95,56	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
25	Kelautan dan Perikanan	1 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Produksi Perikanan tangkap dan budidaya (ton)	58.811,00	100,00%	Dinas Perikanan	
			Target Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	58.811,00			
		2 Angka Konsumsi Ikan	Angka KI = Angka KRT+Angka KLRT + Angka KTT		42,74	Dinas Perikanan	
26	Pariwisata	1 Persentase Investasi Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	Realisasi investasi sektor Penyediaan akomodasi, Makan, minum	26.093.100.000,00	2,92%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
			Realisasi investasi tahun N	894.787.449.526			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
27	Pertanian	2 Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	jumlah wisatawan asing tahun 2025 - jumlah wisatawan asing tahun 2024	12.921-11.362	x 100	13,72%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			_____ X 100 jumlah wisatawan asing tahun 2024	11362			
		3 Persentase peningkatan Perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	jumlah wisatawan nusantara tahun 2025 - jumlah wisatawan nusantara tahun 2024	67.238-54.680	x 100	22,97%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			_____ X 100 jumlah wisatawan nusantara tahun 2024	54,68			
		1 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah tanaman pangan tahun 2025 - jumlah tanaman pangan tahun 2024	45484.42-47904.92	x 100	-5,05%	Dinas Pertanian dan Pangan
			Produksi tanaman pangantahun 2024 _____ x 100	47.904,92			
		2 Pesentase peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun 2025- produksi hortikultura tahun 2024	3456.12-4103.17	x 100	-16,50%	Dinas Pertanian dan Pangan
			_____ x 100 Produksi hortikultura tahun 2024	4.103,17			
		3 Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun 2025- Produksi komoditas peternakan tahun 2024	2044.103-1847.990	x 100	10,612%	Dinas Pertanian dan Pangan
			_____ x 100 Produksi komoditas peternakan tahun 2024	1.847,99			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
		4 Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular strategis (diperoleh dari surveylance Penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular)	$\frac{\text{Luas wilayah terkendali dari peyakit hewan menular strategis tahun ini}}{\text{Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular startegis}} \times 100$	$\frac{20641,77}{31318,25} \times 100$	65,910%	Dinas Pertanian dan Pangan	
28	Perdagangan	1 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun 2024}}{\text{Jumlah Potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten}} \times 100$	$\frac{671}{1.027} \times 100$	65,34%	Dinas Perdagangan-an, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
29	Perindustrian	1 Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah		1		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		2 Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional}}{\text{Jumlah seluruh pelaku usaha infustri kecil dan menengah}} \times 100$	$\frac{62}{3072} \times 100$	2,02%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		3 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	$\frac{\text{Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah tahun 2025 - jumlah industri kecil dan menengah tahun 2024}}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2024}}$	$\frac{3072-2917}{2917} \times 100$	5,314%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
		4 Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	$\frac{\text{Jmlah investasi sektro industri}}{\text{Total investasi seluruh sektor}} \times 100$	$\frac{37.827.576.053}{894.787.449.526} \times 100$	4,23%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
30	Perencanaan	1 Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	$\frac{\text{Program dan atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah APBD dan direalisasikan}}{\text{Program kegiatan dalam RKPD yang berkaitan dengan 17 program prioritas presiden}} \times 100$	$\frac{17}{17} \times 100$	100,000%	BAPERIDA	
31	Keuangan	1 Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang bersumber dari Transfer Ke	$\frac{\text{Anggaran Belanja Pegawai Daerah diluar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Anggaran Belanja dalam APBD}}{\text{Anggaran Belanja dalam APBD}} \times 100 \%$	$\frac{591.506.440.961,00}{1.803.614.485.759,00} \times 100 \%$	32,80%	Badan Keuangan Daerah	
		2 Persentase Pendapatan Asli daerah Terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$	$\frac{133.199.906.800,95}{1.742.454.441.125,73} \times 100 \%$	7,64%	Badan Keuangan Daerah	
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah	$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2025}}{\text{Alokasi Anggaran Belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun 2025}} \times 100$	$\frac{963.556.935.888,61}{1.037.179.594.000,00} \times 100 \%$	92,90%	Badan Keuangan Daerah	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
32	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4 Persentase Aloksi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	$\frac{\text{Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transeer kepada daerah dan/atau desa}} \times 100$	$\frac{78.285.907.820,00}{1.447.790.319.759,00} \times 100 \%$	5,41%	Badan Keuangan Daerah	
		1 Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan Perguruan Tinggi (ASN Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah ASN lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah ASN tidak termasuk guru dan nakes}} \times 100$	$\frac{1.167}{1.675} \times 100$	69,67%	BKPSDM	
		1 Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	$\frac{\text{Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah}}{\text{Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah}} \times 100$	$\frac{3}{3,00} \times 100$	100%	BAPERIDA	
33	Penelitian dan Pengembangan						
34	Pengawasan	1 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	PENILAIAN MANDIRI 3		Inspektorat Kabupaten	
		2 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP	PENILAIAN MANDIRI 3		Inspektorat Kabupaten	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
35	Pengadaan	3 Manajemen Resiko Indeks	Penilaian MRI		0,00%	Inspektorat Kabupaten	
		4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1	Tindak Lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	681,00	x 100	84,70%	Inspektorat Kabupaten
			Rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	804			
		1 Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ)	Skor indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan			23,68%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
36	Pemerintahan Bidang Hubungan dengan Perwakilan Daerah	2 Pemanfaatan sistem Pengadaan	Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan			35,56%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
		3 Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa			18,95%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
		8 Ketepatan waktu penetapan Perda APBD Tahun 2025	1. Tepat waktu			tepat	Bagian Hukum Setda
			2. Tidak Tepat waktu				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025		SUMBER DATA	KET.
		9 Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025	$\frac{\text{Jumlah Perda Tahun 2025}}{\text{Jumlah Rancangan Perda yang tertuang dalam program pembentukan perda tahun 2025}} \times 100$	$\frac{8}{10} \times 100$	80,000%	Bagian Hukum Setda	
38	Pelayanan Publik	1 Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai penilaian Maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik		91,90	Bagian Organisasi Setda	